

**PERAN *UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY  
FUND* (UNICEF) TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN  
KESEHATAN ANAK MELALUI PAUD-HI  
DI SULAWESI SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan  
Internasional*

**OLEH:**

**NURUL ANISA**

**E13110008**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2014**

## ABSTRAK

Nurul Anisa, E131 10 008 dengan judul skripsi “*Peran United Nation Internasional Children’s Emergency Fund (UNICEF) Terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan*” di bawah bimbingan Adi Suryadi sebagai pembimbing I dan Pusparida Syahdan sebagai pembimbing II. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran organisasi *United Nation Internasional Children’s Emergency Fund (UNICEF)* terhadap program PAUD-HI di Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat efektifitas kerjasama pemertintah dan Unicef dalam Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif. Sementara itu, teknik pengumpulan data dihimpun dari data primer dan sekunder. Data primer diolah dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa informan. Data sekunder diolah dari buku, jurnal, laporan tertulis, dan dokumen-dokumen lainnya yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh organisasi *United Nation Internasional Children’s Emergency Fund (UNICEF)* terhadap program PAUD-HI tersebut adalah dengan advokasi dan *capacity building*. Sedangkan efektifitas kerjasama pemertintah dan Unicef dalam menjalankan program tersebut adalah dengan mengintegrasikan pelayanan PAUD-HI yaitu pendidikan, kesehatan dan bina keluarga balita, menjadi satu tempat menjadi Holisitik dan Intergratif.

Kata Kunci : Organisasi Internasional, Bantuan Luar Negeri, *United Nation Internasional Children’s Emergency Fund (UNICEF)*, PAUD-HI, Sulawesi Selatan

## KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan Bismillahirrahmanirahim. Alhamdulillah skripsi ini dapat selesai setelah mengalami proses yang cukup panjang. Untuk itu puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya dan seluasnya kepada Allah SWT. Karena atas berkah, rahmat dan karunianya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “*Peran United Nation Internasional Children’s Emergency Fund (UNICEF) Terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan*”.

Proses pengerjaan skripsi yang panjang ini akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan dukungan baik fisik dan moril dari banyak pihak. Dan untuk kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing yang menggiring penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Kepada Pak Adi Suryadi, terima kasih untuk semua saran dan masukannya. Kepada Ibu Pusparida Syahdan, terima kasih untuk semua bimbingan, saran-saran, dan perhatiannya. Penulis juga menghaturkan terima kasih setulusnya kepada :

1. Seluruh jajaran pendidik jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Hasanuddin. Kepada Prof. Salusu, Prof. Mappa Nasrun, Pak Patrice Lumumba, Pak Darwis, Pak Muhammad Nasir Badu, Pak Ishak Rahman, Pak Husein Abdullah, Pak Aspianoor, Pak Burhanuddin, Pak Agus, Ibu Isda, Ibu Seniwati. Terima kasih untuk semua bimbingan, saran dan ilmu dari bapak dan ibu semua selama 4 tahun ini.
2. Staf akademik jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Hasanuddin. Kepada Bunda dan Kak Rahma terima kasih jasa dan bantuan semua takkan terlupakan.
3. Terima Kasih untuk semua keluargaku Nenek, Kakek, Tante, Om, dan sepupu-sepupuku tercinta terutama terima kasih sebesar-sebarnya untuk kedua orang tua penulis Nurmang,SE dan Rahmawati Usman S.Pd.Aud yang telah sabar mendidik dan menjaga penulis serta adik-adik saya Muhammad Ashari, Khalifatur Rasydin, Nadya Mardatilla, Arif Zul Fikar Nur, Ahmad Farel.

4. Terima kasih teman angkatan HITEN untuk A. Hasan AL Husain yang telah menjadi ketua angkatan 2010, Adey, Nune, Ime, Jiji, Epan, Mba Ayu, Tya, Citra, Daus, Bang Dhito, Djuned, Fiqhi, Hendra, Ina, Kak Mamad, Mega, Amirah, Nining, Bang Radhit, Rere, Didi, Iqnas, Windy, Yuyun, Dita, Nana, Muli, Syahrul, Aini, Kiki, Tata SEMANGAT KII.
5. Geng Halte yang telah menemani kegilaan dan kegalauan penulis terima kasih untuk Budiaf yang setia mengantar jemputku ke kampus, Nini yang penulis sudah anggap sebagai saudara sendiri terima kasih semua bantuan, dukungannya dan semangatnya, Chelsy si Galau ganjil yang sudah ada di China tidak adami lagi selalu culikka, Nita yang sudah di Ambon, Yaya sampai sekarang kita masih ada yang susah bedakan, Ocín ayoo nginap bareng lagi, Kaka Lia yang baik hati maaf bukunya sampai sekarang belum ku kembalikan, Vian yang susah ditemui, Appu cepatmi juga, buat Ismail maaf kalo saya punya salah sudah setahun lebihmi, Iqbal semangat iqbal selangkah lagi, Maul Semangatki, Pammi yang selalu banyak membantu, Krisna teman ujian proposalku, Jul jangan main game terus kerja itu skripsi, Widya Si Cina yang selalu memanggilku Emmang,
6. Geng Bontomannai terima kasih untuk Dachniar Dwi Astuti semoga cepat menjadi Dokter, Kakak Irda semoga cepat mup on, Kakak Iccang dan Kak Ummi semoga selalu akur buat kalian terima kasih yang selalu menemani penulis buat skripsi ini.
7. Buat teman-temanku Putri, Esti, Asmi, Kartini, DTU, Ivo, Oda, Anggi, Riksa, Fitri tengkyuu.
8. YVCI (Yamaha Vixion Club Indonesia) chapter Palopo dan Makassar buat kak rhyda, kak Ian, kak Ardi, kak Anwar, Anca semangatki skripsinya, Pak Arif Ketua Yvc-Palopo, Kak Oyyenk, Kak Haidir, dan buat Boncengers kak ridha, kakak Uyha, kak antip, Bunda Farah yang selalu kasi semangat dan nasehat kepada penulis dan semoga bisa ikut touring lagi kasian.
9. Untuk Kakak tersayang Muh.Irfhan yang telah menemani penulis hampir 4tahun yang kesetiaannya selalu diragukan terima kasih dukungan dan pengertiannya selama penulis menulis skripsi ini.

10. Dan terakhir terima kasih banyak kepada Unicef, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Bappeda yang tiada bosannya melihat penulis datang ke kantor untuk meneliti dan bertanya.

Akhirnya penulis persembahkan skripsi ini untuk semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan diberkahi Allah SWT. Cukup sekian dan biar penulis yang berterima kasih.

Makassar, Januari 2015

Nurul Anisa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian .....	18
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Organisasi Internasional.....	21
B. Bantuan Luar negeri.....	26
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM UNICEF dan PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK MELAU PROGRAM PAUH-HI DI SULAWESI SELATAN</b>	
A. <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i> (Unicef) di Indonesia.....	32
B. Perkembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan .....	48
C. Bantuan <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i> terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan .....	59

**BAB IV PERAN *UNITED NATION INTERNATIONAL CHILDREN'S  
EMERGENCY FUND* (UNICEF) TERHADAP  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN  
MELALUI PAUD-HI DISULAWESI SELATAN**

- A. Kepentingan dan Peran *United Nations International Children's  
Emergency Fund* terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan  
melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan ..... 65
- B. Efektifitas Kerjasama Pemerintah dan Unicef terhadap Pengembangan  
Pendidikan dan Kesehatan melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan 77

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 85
- B. Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA ..... 88**

**LAMPIRAN ..... 91**

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>No</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1	Paud Holistik	58
Gambar 3.2	Bantuan Unicef Berdasarkan Laporan Tahunan 2012	62



## **DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1	Organisasi Program Kerjasama	44
Tabel 3.2	PAUD-HI Taman Padditungka Kabupaten Bone	53
Tabel 3.3	PAUD-HI Taman Assamaturu Kabupaten Takalar	56
Tabel 3.4	Peran Pengasuh Dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Anak	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	PAUD-HI Taman Padditungka Kabupaten Bone	90
Lampiran 2	Siaran Pers Pemerintah Indoenesia dan Unicef	91

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hubungan internasional saat ini didominasi oleh pola-pola hubungan yang kooperatif. Sehingga hubungan yang lebih damai dapat tercapai di antara negara-negara di dunia yang saling bekerjasama. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan ini kemudian membentuk pola-pola hubungan yang mutual gains yaitu hubungan kerjasama yang menguntungkan setiap pihak. Selain itu pola-pola hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain (hubungan interdependensi) juga menjadi suatu hubungan yang dipilih oleh negara-negara di dunia internasional saat ini daripada pola hubungan anarkhis, konflik maupun perang.

Sebagai implikasi dari adanya pola-pola hubungan yang lebih kooperatif di antara negara-negara di dunia maka isu-isu yang berkembang pada hubungan internasional saat ini adalah isu-isu yang terkait dengan isu-isu kemanusiaan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, gender, Hak Asasi Manusia (HAM), dll sebagai konsekuensi logis dari adanya pola hubungan dunia internasional yang bersifat lebih damai dan kooperatif. Negara-negara di dunia serta organisasi internasional saat ini mulai berkomitmen untuk melakukan perbaikan taraf hidup dan pembangunan atas dasar prinsip-prinsip

kemanusiaan bagi seluruh umat manusia agar memiliki hak-hak dasar hidup yang sejajar dengan manusia lainnya.

United Nations Children's Fund (UNICEF) atau Badan PBB untuk anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946<sup>1</sup>. Bermarkas besar di Kota New York, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. UNICEF adalah salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.

UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada tahun 1948<sup>2</sup>. Saat terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950<sup>3</sup>. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup

---

<sup>1</sup>Sejarah Singkat UNICEF di Indonesia. [http://www.UNICEF.org/indonesia/id/overview\\_3108.html](http://www.UNICEF.org/indonesia/id/overview_3108.html) diakses tanggal 18 April 2014

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya.

Pada awal 1960an, UNICEF berkembang menjadi organisasi pembangunan yang lebih terkonsentrasi pada kesejahteraan anak daripada sekedar bantuan kemanusiaan. Awalnya fokus kerjasama kelangsungan hidup anak-anak. Baru kemudian fokus berkembang pada masalah-masalah lain yang menguntungkan kedua belah pihak. Selama lebih dari 60 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita.

Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan melobi adopsi Undang-undang Perlindungan Anak 2002. Undang-undang ini akan menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak anak. Sekarang UNICEF memiliki kantor di 12 kantor wilayah untuk membantu melaksanakan program di 15 propinsi yang mencakup lebih dari 20 juta orang Indonesia<sup>4</sup>. Program-program UNICEF di Indonesia saat ini mencakup serangkaian isu seperti Kesehatan & Gizi ibu dan anak, Pendidikan Dasar dan Kesehatan untuk semua, Perlindungan Anak, Memerangi HIV/Aids serta Air & Kebersihan Lingkungan.

---

<sup>4</sup>Sejarah Singkat UNICEF di Indonesia. [http://www.UNICEF.org/indonesia/id/overview\\_3108.html](http://www.UNICEF.org/indonesia/id/overview_3108.html) diakses tanggal 18 April 2014

Secara umum UNICEF merupakan organisasi yang membantu anak-anak dalam mendapatkan perhatian dan perawatan yang dibutuhkan ketika mereka kecil karena tanpa didasari perhatian dan kasih sayang seseorang anak dapat mengalami keterbelakangan mental dan moral. Hal tersebut sudah banyak terjadi di Indonesia, khusus di Indonesia kebanyakan anak mengalami ketidakadilan dalam mendapatkan haknya. Kebanyakan orang tua memperlakukan anak-anaknya dengan didikan yang keras dan tidak dipenuhi dengan kasih sayang.

Karena secara daya pikir bahwa kasih sayang orang tua tidak lepas dalam mendidik anak-anaknya. Karena untuk pola pikir kebanyakan orang tua, dengan memberikan segala keperluan yang diperlukan anaknya maka mereka sudah membahagiakan anak-anaknya, akan tetapi pola pikir sangat salah. Oleh didasari kurangnya kepedulian tersebut banyak juga anak-anak yang dipaksa untuk bekerja dibawah umur, dengan pekerjaan seperti mengamen, berjualan, bahkan buruh kasar. Sesuai salah satu Undang – undang bahwa yang dikatakan “Anak adalah setiap orang berumur dibawah 18 tahun” jadi tidak diperbolehkan untuk bekerja secara kasar. Melainkan berhak mendapatkan pendidikan Sembilan tahun, seperti yang diprogramkan pemerintah RI.

Selain itu keterpurukan mutu pendidikan dan moral yang sekarang ini di alami Indonesia juga berpengaruh bagi anak-anak karena dengan kesalahan

pendidikan yang dialami oleh mereka, maka anak-anak juga akan tumbuh dengan pendidikan dan moral yang buruk. Oleh karena kurangnya kepedulian kita, maka organisasi anak dunia ini bergerak untuk bertujuan untuk membantu anak-anak yang ada di Indonesia, sesuai dengan perjanjian yang dibuat di semua Negara untuk anak-anak, dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak. Maka dalam hal itu UNICEF memastikan agar setiap anak yang sebagai salah satu aspek pembangun bangsa memperoleh perlakuan khusus untuk dilindungi dan di perhatikan oleh suatu Negara .

Anak-anak usia dini di Indonesia yang termasuk dalam kelompok usia 0 hingga 6 tahun berada dalam tahap awal pertumbuhan yang dikenal dengan istilah “golden age” atau masa keemasan<sup>5</sup>. Berdasarkan fakta ilmiah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud) meluncurkan program “Pendidikan Anak Usia Dini” atau disingkat PAUD melalui Pasal 28 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003<sup>6</sup>. Pada tahun 2006 Kemdikbud menjalin kerja sama dengan UNICEF Indonesia untuk mengembangkan PAUD di daerah-daerah kurang mampu di Indonesia, yang kemudian istilahnya berkembang menjadi “Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik dan Integratif” atau PAUD-HI, dimana kita ketahui kegiatan BKB, Posyandu dan PAUD selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga ada

---

<sup>5</sup> Penyusunan Modul PAUD Taman SIWALIPARRI. <http://www.mdgspolman.org/penyusunan-modul-taman-siwaliparri/> diakses 19 April 2014

<sup>6</sup>Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <http://www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>, diakses tgl 27 April 2014

kesan di masyarakat bahwa ketiga kegiatan tersebut berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan akhir yang tidak ada kaitannya satu sama lain.

Apabila didalami lebih jauh, ketiga kegiatan tersebut sebenarnya dapat dipadukan/disinergikan karena satu sama lain saling mengisi dan melengkapi, terutama bila hal ini dikaitkan dengan tujuan pendidikan. Sebab kenyataan menunjukkan, mereka yang sukses di masyarakat tidak selalu hanya pintar secara intelektual, tetapi yang juga baik kecerdasan sosial dan motoriknya.

Dengan konsep pendekatan secara holistik dan terintegrasi dengan unsur-unsur kehidupan masyarakat lainnya. Pengembangan anak usia dini tidak hanya bertolak ukur pada segi pendidikan, tetapi erat kaitannya dengan pergaulan dan komunikasi di lingkungan keluarga, unsur sosial dan budaya masyarakat, asupan gizi dari sang ibu sejak anak berada dalam kandungan dan selama masa menyusui, kebersihan lingkungan, hingga unsur religi/agama. Di tingkat kabupaten di Indonesia, PAUD-HI menjadi program yang melibatkan partisipasi aktif berbagai instansi pemerintah, mulai dari Dinas Pendidikan (Dindik) melalui gerakan PAUD, Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Posyandu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Bina Keluarga Balita (BKB), hingga Dinas Agama dan Dinas Sosial.

Maka dari itu UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Indonesia membuat program PAUD -HI agar disinergikan satu sama lain. Terutama di



Sulawesi Selatan UNICEF membuat program PAUD-HI di Kabupaten Bone dan Takalar yang bernama “Taman Paditungka” dimana anak usia dini tidak hanya bertolak ukur pada segi pendidikan, tetapi erat kaitannya dengan pergaulan dan komunikasi di lingkungan keluarga, unsur sosial dan budaya masyarakat, asupan gizi dari sang ibu sejak anak berada dalam kandungan dan selama masa menyusui, kebersihan lingkungan, hingga unsur religi/agama.

UNICEF melakukan pendekatan sebagai awal agar tidak terpecah berbasis masyarakat layanan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Dari Pepres No 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak dan untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holisti-Integratif. [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/09/18/p/e/perpres\\_no.60-2013.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/09/18/p/e/perpres_no.60-2013.pdf), diakses tgl 28 April 2013.

Untuk di Sulawesi Selatan UNICEF mengambil 2 kecamatan di Kabupaten Bone yaitu Kecamatan Dua Boccoe dan Ponre dengan jumlah 15 TP. Daerah ini dipilih dengan alasan adanya permasalahan dasar yang harus diatasi yaitu masih kurangnya Taman Kanak- Kanak (TK) dan minimnya fasilitas kesehatan. Tahun 2010, ada penambahan 30 TP yang direplikasi di 15 kecamatan<sup>8</sup>.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian tentang *“Peran UNICEF Terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan”*

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Anak adalah masa depan bangsa. Berdasarkan penelitian para ahli bahwa anak dalam masa umur 0-6 tahun adalah anak yang berada dalam masa keemasan, dimana anak berada dalam masa tumbuh kembang, dengan miliaran sel saraf otak anak yang harus distimulus agar tercipta insan cerdas dan kreatif.

Pengembangan konsep Taman Paditungka (TP) dimulai pada tahun 2006, dimana Pemkab Bone dan Pemkab Takalar Sulawesi Selatan dengan

---

<sup>8</sup>Inspirasi Bakti Taman Paditungka-Program Terpadu Anak Usia Dini. <http://www.bakti.or.id/kegiatan/inspirasi-bakti-taman-paditungka-program-terpadubagianakusia-dini> diakses 6 April 2014.

pendampingan dari UNICEF mendesain ulang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam sebuah program pendidikan anak yang holistik dan terintegrasi yaitu mengintegrasikan aspek kesehatan, gizi dan stimulasi psikologis, pemberian kesempatan untuk menggali dan belajar secara aktif, pengasuhan sosial dan emosional dalam rangka mengembangkan potensi anak.

Dalam penelitian ini, perlu juga diketahui mengenai Peran UNICEF dalam Perkembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan selama lima tahun, yaitu 2008 hingga 2012.

Untuk itu, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kepentingan dan peran UNICEF dalam perkembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui program PAUD-HI di Sulawesi Selatan?
2. Apa dampak pemerintah Sulawesi Selatan dengan UNICEF dalam perkembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui program PAUD-HI di Sulawesi Selatan ?

#### **A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kepentingan dan peran UNICEF dalam perkembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui program PAUD-HI di Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak pemerintah Sulawesi Selatan dengan UNICEF dalam perkembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui program PAUD-HI di Sulawesi Selatan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa beserta dosen-dosen Ilmu Hubungan Internasional ataupun masyarakat pada umumnya yang memiliki minat untuk mengkaji peran UNICEF dalam perkembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui program PAUD-HI di Sulawesi Selatan.
2. Diharapkan menjadi referensi tambahan bagi pengkaji PAUD-HI di Sulawesi Selatan.

### **C. Kerangka Konseptual**

Dalam menganalisis permasalahan tentang peranan UNICEF terhadap pengembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan ini maka penulis menggunakan beberapa konsep dalam kajian Hubungan Internasional, yakni:

### **a. Organisasi Internasional**

Organisasi internasional atau yang disebut "*Multilateralisme*" adalah suatu istilah [hubungan internasional](#) yang menunjukkan kerjasama antar beberapa [negara](#) yang dibentuk dalam suatu gerakan organisasi yang tujuannya bersifat umum ataupun khusus, serta ruang lingkup keanggotaan dari organisasi internasional ini bisa bersifat global maupun regional. Organisasi internasional tersebut tidak dapat bertindak tanpa persetujuan pihak yang terlibat dalam suatu masalah, dan persetujuan untuk melakukan kerjasama biasanya di buat berdasarkan penyesuaian terhadap negara yang paling kecil tingkatannya untuk bersikap kooperatif.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang paling besarselama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasam di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusinya melalui instrumen pokok berupa piagam dengan tekad semua anggotanya untuk megnhindari terulangnya acaman perang dunia yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia. Disamping itu Piagam PBB juga telah meletakkan tujuannya dan prinsip yag mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan bersama dan mencapai kerjasama internasional di semua bidang.

Salah satu karakter politik global yang paling penting pada awal abad kedua puluh ini adalah semakin menjamurnya organisasi internasional di penjuru dunia. Walaupun demikian, negara tetap menjadi aktor yang mendominasi hubungan internasional. Hal ini dikarenakan, interaksi yang dilakukan organisasi internasional yang merupakan aktor non-negara tetap berada di bawah pengawasan pemerintah atau negara setempat.

Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya : *“Administrasi dan Organisasi Internasional”* menegaskan bahwa :

“ Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas – batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda<sup>9</sup>”.

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya : *“Administrasi dan Organisasi Internasional”* menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

---

<sup>9</sup> Teuku May Rudy, 2009, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: Angkasa, hal. 3.

<sup>10</sup> Ibid, hal 27-28

Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.

1. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai
2. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan ( antara lain kegiatan social kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping*, operation dll ).

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah<sup>11</sup>:

1. Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO ( antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian – perjanjian Internasional.

---

<sup>11</sup> Ibid hal 27-28

3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim – rejim Internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional adalah suatu proses organisasi internasional juga menangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperluakan dalam rangka kerja sama yang menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul<sup>12</sup>.

Cheever dan Haviland mendefinisikan organisasi internasional secara sederhana sebagai: “*Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented trough periodic meetings and staff activities*”<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc, 2003, Organisasi Internasional & Intergrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 48.

<sup>13</sup> Teuku May Rudy, op cit., hal. 2.



Organisasi internasional digambarkan sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berdasarkan atas status persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staff secara berkala.

**b. Bantuan Luar Negeri (*foreign aid*)**

Dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui program PAUD di Sulawesi Selatan, perlu kiranya untuk melihat konsep bantuan luar negeri. konsep bantuan luar negeri ini akan membantu menjelaskan bagaimana alur bantuan yang diberikan melalui program UNICEF di Indonesia. Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum, bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah lain, baik itu berbentuk bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya.

*Foreign aid* (bantuan luar negeri) adalah kegiatan transfer sumber daya dari satu negara kaya ke negara lainnya yang lebih miskin. Dalam bentuknya yang primitif *foreign aid* telah muncul sejak sebelum perang dunia kedua. Saat itu ada semacam norma tak tertulis dimana pemerintah negara kaya mempunyai semacam tanggung jawab untuk membantu negara lain yang

miskin atau terbelit situasi krisis. Namun norma semacam itu sekarang sulit sekali untuk kita temukan. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi pergeseran perspektif dalam memaknai *foreign aid*.

Variabel-variabel semacam perubahan tatanan politik domestik negara donor, peristiwa-peristiwa internasional, serta tekanan dari organisasi internasional untuk pengalokasian *foreign aid* untuk pengembangan kemanusiaan yang lebih baik sangat berperan dalam menentukan arah perubahan kebijakan bantuan luar negeri. Ada beberapa periode penting dalam perkembangan bantuan luar negeri. Periodisasi ini menekankan pada karakteristik arah, aktor, motif dan tujuan bantuan luar negeri yang membedakan satu periode dari periode lainnya.

Menurut Yanuar Ikbar bantuan luar negeri adalah:

“Bantuan luar negeri adalah segala sesuatu yang berurusan dengan pemindahan sumber-sumber kebendaan material dan jasa-jasa dari negara tertentu terhadap negara lainnya yang memerlukannya dalam suatu ikatan transaksi berbentuk pinjaman, pemberian, dan penanaman modal asing. Bantuan luar negeri (*foreign aid*) diartikan sebagai tindakan-tindakan masyarakat atau lembaga-lembaga terhadap masyarakat atau lembaga-lembaga lain di luar negeri dengan maksud sekurang-kurangnya untuk membantu”<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Yanuar Ikbar, 2007, *Ekonomi Politik Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama, hal. 188-189.

Dari kesimpulan diatas bahwa bantuan luar negeri (*foreign aid*) dapat diberikan oleh negara ke negara atau pemerintah ke pemerintah, negara ke lembaga/organisasi ataupun sebaliknya dari lembaga/organisasi ke negara/pemerintah, atau dari lembaga/organisasi ke lembaga/organisasi lainnya. UNICEF mendapatkan bantuan luar negeri dari para pendonornya yang kemudian dijadikan sebagai alat pendanaan bagi seluruh program-programnya di negara-negara mitranya khususnya Indonesia dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan anak.

Dari keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No 1 tahun 1979, Bantuan Luar Negeri adalah segala bentuk bantuan berasal dari Luar Negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Negara Asing, organisasi atau perseorangan di luar negeri kepada lembaga keagamaan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia<sup>15</sup>.

Terdapat dua syarat aliran modal dari luar negeri merupakan bantuan luar negeri, yaitu<sup>16</sup>:

1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan;

---

<sup>15</sup> Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 1979, <http://produk.hukum.kemenag.go.id/downloads/a8d848d723caa8e1fe0f2e1e97e68a4c.pdf> diakses tgl 30 April 2014.

<sup>16</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Graha Ilmu:Bandung, Hal.49.

2. Aliran modal dari luar negeri atau dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional.

Oleh sebab itu, aliran modal dari luar negeri yang tergolong sebagai bantuan luar negeri dapat berupa pemberian (*grant*) dan pinjaman luar negeri (*loan*) yang diberikan oleh negara-negara donor atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman luar negeri, seperti Bank Dunia (*World Bank*), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*), Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*).

Holsti membagi program bantuan luar negeri ke dalam empat jenis, yaitu<sup>17</sup>:

1. Bantuan Militer;
2. Bantuan Teknik;
3. *Grant* dan program komoditi impor;
4. Pinjaman pembangunan.

---

<sup>17</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, *Op cit*, hal.83.

Alasan pemberian bantuan oleh suatu negara atau institusi tertentu terutama ialah *self-interest* politik, strategi, dan ekonomi, sekalipun pada umumnya alasan itu berupa motivasi moral dan bantuan kemanusiaan atau bantuan untuk kesinambungan proses hubungan komplementasi dan pembangunan pihak lain.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-analisis. Dimana tujuannya adalah mengeksplorasi dan klarifikasi. Dimulai dengan menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menjabarkan mengenai Peranan UNICEF dalam perkembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui program PAUD-HI di Sulawesi Selatan

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diperoleh berupa data sekunder. Data sekunder berasal dari berbagai literatur baik berupa buku, buletin, jurnal, artikel, surat kabar, website resmi, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk kebutuhan literatur dan informasi, penulis mengunjungi tempat-tempat berikut:

1. Perpustakaan Universitas Hasanuddin
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS
3. Perpustakaan HIMAHI FISIP UNHAS
4. Perwakilan UNICEF di Makassar
5. BAPPEDA Sulawesi Selatan
6. Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan
7. Kantor Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan
8. Taman Paditunga (TP) Bone dan Takalar
9. Kantor BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia)  
di Makassar

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis melakukan telaah pustaka (library research.) Penelaahan disertai dengan melihat perkembangan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 4. Teknik Analisa

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yakni permasalahan digambarkan berdasar fakta-fakta yang ada kemudian

dihubungkan antara fakta yang satu dengan yang lainnya, kemudian ditarik sebuah simpulan. Ada pun data berupa angka merupakan data penunjang dalam mengkaji fakta-fakta utama. Dengan menggunakan teknik ini, maka teknik analisa menggunakan pola induktif yakni dari hal-hal yang sifatnya khusus kemudian menariknya pada hal yang bersifat umum.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Organisasi Internasional**

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi internasional. Hal tersebut dikarenakan keberadaan organisasi internasional telah diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Organisasi internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya.

Pada era ini, dengan adanya perkembangan teknologi terutama dibidang transportasi, informasi, dan komunikasi memacu individu-individu dan kelompok lain yang tidak bergerak sebagai aktor negara untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar negara mereka baik itu aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Semakin besarnya frekuensi kerjasama ditambah dengan adanya suatu kesamaan maksud dan tujuan dalam kerjasama tersebut membuat para aktor tersebut membentuk suatu organisasi internasional.



Hubungan Internasional bukan hanya tentang hubungan negara-negara tetapi juga hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari negara yang berbeda<sup>18</sup>. Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy,

pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antara negara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda<sup>19</sup>.

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional dalam hal ini yang menonjol yaitu peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja dan negara tetap dalam aktor yang paling dominan. Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja. Setiap organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya.

. Pada umumnya jika berbicara tentang organisasi internasional, maka yang dimaksudkan adalah organisasi internasional yang dibentuk antarpemerintah (intergovernmental organization) walaupun harus diakui bahwa disamping organisasi non pemerintah (non-governmental organizations

---

<sup>18</sup> Robert J. Dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 144

<sup>19</sup> Teuku May Rudy, 2009, *Administrasi & Organisasi Internasional*, Bandung: Refika Aditama, hlm.. 19.

atau disebut juga dengan NGO). Suatu negara yang memiliki sistem demokrasi yang baik, tidak akan menganggap NGO sebagai ancaman bagi kekuasaan negaranya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi Suryadi Culla dalam bukunya “Rekonstruksi Civil Society” bahwa keberadaan NGO tidak dapat terlepas dari realitas sistem politik suatu negara.<sup>20</sup> Kehadiran NGO dianggap dapat mengisi ruang publik dalam rangka pembentukan agenda publik.

Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Setiap organisasi dibentuk untuk melaksanakan peran dan fungsinya sesuai tujuan pendirian organisasi internasional. Peran organisasi internasional yaitu<sup>21</sup> :

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencengah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosila kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, oemugaran monumen bersejarah, peace keeping operation dan lain-lain).

---

<sup>20</sup> Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 28

<sup>21</sup> Teuku May Rudy, op cit., hal. 27.

Dan fungsi organisasi internasional adalah sebagai tempat wadah berhimpun bagi negara-negara anggota bila organisasi tersebut itu IGO (antar-negara/pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi itu termasuk kategori INGO (non pemerintah), untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakasai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional, untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim-rejim internasional, penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota (bisa dengan negara lain yang bukan anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainnya, penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota<sup>22</sup>.

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidaklah lebih tinggi dibanding negara-negara anggotanya. Organisasi adalah wadah kerjasama berdasarkan anggota.

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa hubungan internasional tidak hanya mengkaji hubungan politik antarnegara, tetapi juga mengkaji

---

<sup>22</sup> Ibid.

organisasi-organisasi internasional. Organisasi adalah wadah yang terdiri dari unit-unit yang saling bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Dari definisi tadi secara sederhana organisasi internasional mencakup adanya tiga unsur, yakni<sup>23</sup> :

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.
3. Adanya staf yang bekerja sebagai ‘pegawai sipil internasional’ (international civil servant)

Sementara pendapat yang lain, T. May Rudi menjelaskan bahwa organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 3.

negara yang berbeda. Dari penjelasan T. May Rudi tadi dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi internasional, yaitu<sup>24</sup> :

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Baik antara pemerintah dan non-pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Dengan demikian, organisasi internasional dibentuk oleh anggota-anggotanya sebagai wadah kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan bersama. Semua anggotanya berperan membesarkan, memajukan, dan menggerakkan jalannya suatu organisasi tersebut. Sebaliknya, organisasi dapat memberikan dan membantu kebutuhan mereka dengan meraih apa yang menjadi keinginan sesuai kebutuhan tersebut seperti untuk kepentingan nasionalnya yaitu melalui dengan diplomasi yang baik antara kedua belah pihak negara dalam membahas persoalan yang menjadi permasalahan seperti ketenagakerjaan Indonesia yang berada di wilayah negara lain dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 4.

Salah satu organisasi internasional adalah UNICEF yang Badan PBB untuk anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB. UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya. Maka dari itu UNICEF membuat program untuk ibu dan anak dengan program PAUD-HI agar program layanan tersebut saling terkait secara simultan dan sistematis dalam mengembangkan kebutuhan esensial anak usia dini yang beragam, baik kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

## **B. Bantuan Luar Negeri**

Dalam konteks penelitian ini, untuk melihat peranan UNICEF dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan, perlu kiranya untuk melihat konsep bantuan luar negeri. Konsep bantuan luar negeri ini akan membantu menjelaskan bagaimana alur bantuan yang diberikan oleh para pendonor kepada UNICEF untuk kemudian diimplementasikan melalui program-program UNICEF di Indonesia.

Secara umum bantuan luar negeri adalah proses transfer barang atau dana dari satu negara ke negara lain. Bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana. Menurut Rix Alam dalam buku

“*Pengantar Hubungan Internasional*” karangan Perwita dan Yani, ada empat motivasi dari negara donor dalam memberikan bantuan, diantaranya:<sup>25</sup>

1. Motivasi kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi;
2. Motivasi politik yang merumuskan tujuan untuk meningkatkan *image* negara donor. Peralihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan dari luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri negara donor;
3. Motivasi keamanan nasional, yang didasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motivasi keamanan memiliki sisi ekonomi;
4. Motivasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor.

Sebagai sebuah instrumen kepentingan, bantuan luar negeri dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis bantuan. Sebelumnya, kita perlu membedakan dulu secara mendasar antara pinjaman bilateral dan multilateral dalam kelompok pinjaman luar negeri. Pinjaman bilateral adalah pinjaman yang diberikan secara langsung dari suatu pemerintah (umumnya negara

---

<sup>25</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Graha Ilmu:Bandung, Hal. 84.

maju) kepada suatu pemerintah negara berkembang, sehingga sering juga disebut *G to G (Government to Government Aid)*. Sedangkan pinjaman multilateral adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti: Kelompok Bank Dunia (*World Bank Group*), *International Monetary Fund (IMF)*, PBB, dan lain-lain.<sup>26</sup> Dalam prakteknya, ICMC memberikan bantuan luar negeri berupa hibah kepada Indonesia secara khusus Sulawesi Selatan dalam penanggulangan perdagangan wanita dan anak. Berdasarkan hal tersebut, bantuan luar negeri yang difokuskan adalah mengenai masalah hibah luar negeri.

Ada beberapa indikator dalam pemberian dana hibah, indikator tersebut dikelompokkan menjadi:<sup>27</sup>

#### 1. Hibah Menurut Skema dan Bentuknya

- a. Hibah dalam bentuk *cash*, hibah ini sangat terbatas dan diberikan kepada negara-negara yang sangat miskin (pendapatan perkapita/tahun kurang dari USD 200). Tujuannya untuk memperbaiki neraca pembayaran negara-negara tersebut;
- b. Hibah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek (*project assistance*) atau kerjasama keuangan (*financial*

---

<sup>26</sup> Jelly Leviza, 2009, *Tanggung Jawab bank Dunia dan IMF sebagai Subjek Hukum Internasional*, Jakarta: Sofimedia, hal. 2.

<sup>27</sup> Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, 2003, *Penatausahaan dan Pengelolaan Hibah Luar Negeri*, Jakarta: Bappenas.



*cooperation*). Hibah seperti ini berupa dana dan diberikan bersama-sama dengan pinjaman untuk pembiayaan suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemberi hibah sementara penerima hibah hanya menerima barang dan jasa;

- c. Hibah dalam rangka bantuan teknik (*technical assistance*) atau kerjasama teknik (*technical cooperation*). Pertama, proyek-proyek yang dibiayai hibah ini umumnya berupa studi untuk persiapan, *appraisal* atau pun monitoring proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini pihak pemberi dana menyediakan tenaga ahli dan membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga ahli tersebut. Pihak penerima hibah hanya memfasilitasi kegiatan tenaga-tenaga ahli tersebut dan menerima hasil studi, *appraisal* dan monitoring. Kedua, hibah dalam rangka *technical assistance* yang berdiri sendiri. Hibah dalam skema ini pada dasarnya berupa penyediaan tenaga ahli dan atau konsultan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan tertentu. Semua pembayaran/pembiayaan tenaga ahli dilakukan sepenuhnya oleh pihak donor. Penerima hibah umumnya hanya menyediakan fasilitas pendukung (*in-kind*) seperti ruang kantor, personalia pendamping, kendaraan agar tenaga ahli tersebut dapat bekerja dengan baik. Ketiga, beasiswa dan pelatihan;

- d. Hibah dalam rangka bantuan kemanusiaan (*humanitarian aids*).

Hibah ini sifatnya lebih merupakan bantuan darurat. Hibah yang diberikan biasanya berupa bahan esensial yang sangat diperlukan seperti pangan, obat-obatan atau selimut serta ada kalanya uang tunai.

## 2. Hibah menurut peruntukan dan penyalurannya

- a. Hibah untuk pemerintah (*government to government*). Hibah jenis ini adalah hibah dalam berbagai skema diatas yang diperuntukkan bagi proyek-proyek pemerintah atau kegiatan- kegiatan dalam rangka proyek pemerintah dan umumnya dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau lembaga bentukan (semi) pemerintah. Hibah ini diberikan donor atas dasar usulan pemerintah penerima hibah dan dalam kerangka kerjasama dengan lembaga multilateral/internasional yang bersangkutan.
- b. Hibah untuk non pemerintah (*government to private*). Hibah ini diberikan langsung oleh pemerintah atau lembaga donor kepada lembaga-lembaga non pemerintah.

Adanya perbedaan tingkat kemakmuran diantara negara-negara yang ada di dunia merupakan salah satu masalah ekonomi yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Negara maju memiliki kekuatan dan kemampuan ekonomi yang lebih baik berkewajiban untuk membantu negara-negara yang

sedang berkembang yang mengalami kesulitan ekonomi dan untuk membantu pembangunan di negara-negara berkembang.

Bantuan luar negeri baik berupa pinjaman atau barang hibah, maupun kerjasama teknik dari negara pemberi kepada negara penerima adalah instrumen kebijaksanaan yang telah digunakan dalam hubungan internasional selama berabad-abad lampau. Instrumen tersebut terutama tidak digunakan untuk kemaslahatan politik jangka pendek, namun untuk pembangunan ekonomi atau prinsip-prinsip kemanusiaan jangka panjang.

### **BAB III**

#### ***UNITED NATION INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND* (UNICEF) DI INDONESIA dan PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK MELALUI PROGRAM PAUH-HI**

##### **A. Sejarah *United Nation Internasional Children's Emergency Fund* (UNICEF)**

###### **1. Sejarah Berdirinya Unicef**

PBB disebut juga UNO (*United Nation Organization*). PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco (Amerika Serikat). PBB dibentuk atas dasar dari piagam Atlantik yang bertujuan untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional. PBB bergerak di bidang ekonomi, keamanan, dan sosial. PBB berpusat di *New York* ( Amerika Serikat)

Tujuan Organisasi PBB.

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2. Mengembangkan hubungan hubungan persaudaraan antar bangsa bangsa.
3. Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah internasional.
4. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha mewujudkan tujuan bersama.

Pada awalnya, organisasi yang disebut “Organisasi Darurat” ini terbentuk dikarenakan pengaruh yang besar dari perang dunia kedua. Maka dari itu organisasi yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946, setelah Perang Dunia II dalam rangka untuk menyediakan kebutuhan seperti makanan dan pakaian untuk anak-anak di Eropa. Pada tahun 1953, Unicef menjadi badan tetap dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Enam tahun kemudian, sidang umum PBB mengesahkan Deklarasi Hak Anak dan mengidentifikasi hak anak untuk kebutuhan seperti gizi, pendidikan dan tempat tinggal. Pada bulan Desember 1950, majelis Umum PBB memberikan mandat kepada Unicef untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kekurangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang hingga akhirnya pada bulan Oktober 1953, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa Unicef ditetapkan menjadi suatu badan permanen dalam PBB yang menangani masalah anak. Unicef kemudian lebih dikenal sebagai *United Nations Children's Fund*.

Atas dasar rasa kemanusiaan dan peduli terhadap anak-anak secara global, Unicef mengembangkan pergerakannya keseluruh belahan dunia seperti Afrika, Amerika, Timur tengah dan Asia (Indonesia). Secara umum Unicef merupakan organisasi yang membantu anak-anak dalam mendapatkan perhatian dan perawatan yang dibutuhkan ketika mereka kecil karena tanpa

didasari perhatian dan kasih sayang, seseorang anak dapat mengalami keterbelakangan mental dan moral.

### 1.1 Fungsi Unicef

Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada dibawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, Unicef menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut<sup>28</sup>:

- a. Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak-anak.
- b. Memberi *advice* dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
- c. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial Unicef di seluruh negara.
- d. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.
- e. Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.
- f. Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan

Berdasarkan fungsi-fungsi Unicef di atas, dapat dilihat bahwa Unicef sangat peduli dengan anak-anak. Unicef melihat bahwa anak-anak dari tiap

---

<sup>28</sup> Unicef, *Welcome to Unicef, an Orientation Handbook, Training Section, division Of Perssonel Unicef* (New York Unicef 1990), Hal 2.

negara berbeda-beda. Antara kesejahteraan anak-anak di negara berkembang sangat berbeda dengan kesejahteraan anak-anak di negara maju. Hal-hal ini selalu berkaitan baik dengan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian negara bersangkutan. Oleh karena itu, kesejahteraan anak-anak di negara berkembang lebih mendapatkan perhatian khusus oleh Unicef untuk dapat melakukan kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan keseimbangan tersebut dalam menangani masalah seputar anak.

Sebagai organisasi bentukan PBB setelah Perang Dunia II, Unicef memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan perawatan kesehatan yang layak dan makanan untuk anak-anak dan perempuan di dunia. Dari tujuan utama tersebut Unicef memiliki fungsi yaitu penyediaan Infrastruktur pendidikan dasar untuk dunia, meningkatkan tingkat anak hidup di negara berkembang, kesetaraan jender melalui pendidikan bagi anak perempuan, perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, melindungi dan advokasi hak anak Imunisasi bayi dari berbagai penyakit. Penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak-anak.

Pengembangan Analisis Situasi Anak dan Wanita adalah fungsi sentral dari mandat Unicef. Ini adalah output program yang sangat mendukung upaya nasional dan lembaga ini, yang juga bagian dari upaya menyeluruh PBB untuk mendukung kapasitas nasional untuk mempromosikan pembangunan manusia dan memenuhi hak asasi warga negara. Pengkajian dan analisis menunjukkan

dimensi anak relevan dari masalah pembangunan nasional dan merupakan skema dari tindakan prioritas yang terus berkelanjutan. Upaya ini didukung dengan promosi dan penggunaan data analisis studi kualitatif dari pemerintah dan masyarakat sipil yang merupakan mitra kerjasama pembangunan internasional.

## 1.2 Misi Unicef

Adapun misi dari organisasi Unicef, antara lain<sup>29</sup>:

1. Mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan gender serta etika dimata dunia.
2. Menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak adalah tujuan pembangunan universal yang berguna untuk memajukan hidup dari insan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, Unicef banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan pendidikan anak didunia sekalipun.
3. Memobilisasi sumber daya antara kemauan pemerintah dan negara, khususnya kemauan dari negara berkembang.
4. Memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan oleh peperangan,

---

<sup>29</sup> ([http://www.unicef.org/media/media\\_359088.html](http://www.unicef.org/media/media_359088.html)).



kemiskinan, cacat, korban bencana alam, dan segala bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap anak-anak.

5. Melalui Konvensi Hak Anak juga berusaha menegakkan hak-hak anak sebagai prinsip etik dan standar internasional terhadap perilaku anak-anak. Unicef juga menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak-anak merupakan pembangunan individu yang menjadi bagian integral dari kemajuan manusia itu sendiri.

### 1.3 Tujuan Unicef

Tujuan Unicef yaitu Pertama, menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan anak diseluruh dunia yaitu kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijelaskan dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959 dan mereka berhak untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka butuhkan demi pembangunan nasional di tiap-tiap negara.

Kedua, memberikan perhatian pada perkembangan anak terutama di negara berkembang, dimana menekankan kepada pemerintah negara berkembang harus memiliki kebijakan jangka panjang bagi anak-anak dan kaum muda di negaranya untuk meningkatkan kondisi anak-anak yang harus didukung dengan strategi pembangunan internasional.

Ketiga, memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan-kebutuhan dasar anak agar mereka dapat mencapai potensi yang maksimal terutama pada anak-anak yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai, bencana alam, atau korban dari kebijakan domestik yang diberlakukan, serta bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.

Keempat, pengalaman Unicef dalam menyusun kebijakan dan program-program yang terkait dengan anak-anak dapat berguna dalam proses penyusunan target dan prinsip global bidang ekonomi dan sosial, serta dalam menyiapkan strategi-strategi pembangunan.

Kelima, dapat merealisasikan hak anak dan perempuan di dunia sebagaimana tercantum dalam *Convention of the Rights of Children (CRC)* dan *Convention on Elimination of all forms of discriminations Against Women (CEDAW)*<sup>30</sup>.

## **2. Unicef di Indonesia**

Unicef telah membantu Indonesia sejak 1950 untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anak. Untuk masa 1990-1995 tujuan pokok kerjasama pemerintah Indonesia-Unicef adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan pengembangan anak-anak dengan perhatian khusus pada percepatan

---

<sup>30</sup> ibid

penurunan tingkat kesakitan dan kematian pada bayi. Khusus bagi Indonesia Unicef sudah menunjukan rasa kepeduliannya dengan membantu korban-korban (anak-anak) bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia, seperti bencana Tsunami, bencana gempa di nias, bencana lumpur lapindo, dan lain-lain.

Menyusul dengan banyaknya bencana alam di Indonesia, banyak juga bantuan yang datang dari dunia internasional melalui organisasi tersebut. Perhatian utamanya terletak pada bantuan darurat sebagaimana yang dilakukan di negara lain pasca perang dunia kedua. Pada waktu itu, pulau Lombok mengalami kekeringan dan Unicef memberikan bantuan untuk mengantisipasi terjadinya kelaparan. Tahun 1949, kerjasama resmi yang pertama ditandatangani untuk membangun dapur susu di Yogyakarta, pusat pemerintahan pada masa itu. Tahun 1969, pemerintah mencanangkan rencana pembangunan lima tahun pertama. Unicef dan organisasi PBB lainnya seperti WHO memberikan bantuan teknis.

Beberapa dekade berikutnya, Unicef terlibat dalam beberapa program lebih luas yang bertujuan memberikan bantuan kepada kaum perempuan dan anak-anak. Tahun 1990an, Unicef menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam proyek-proyek pembangunan pemberantasan buta huruf dan peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja. Sekitar tahun 2000, kerja sama antara Indonesia dan Unicef diperluas, secara geografis mencapai 65%

penduduk Indonesia. Kemudian, tahun 2004, gelombang tsunami Lautan Hindia menghantam provinsi Aceh. Kurang lebih 230.000 orang meninggal dunia sebagian besar wanita dan anak-anak<sup>31</sup>.

Unicef segera memberikan bantuan darurat kemanusiaan, menyediakan bantuan memperbaiki sarana air bersih dan sarana sanitasi, memberikan bantuan psikologis dan emosi pada anak-anak, membuka kembali sekolahan, mendata dan melacak anak-anak yang hilang, dan bekerja dengan beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhan kesehatan penduduk setempat. Hal tersebut sudah banyak terjadi di Indonesia, kebanyakan juga anak mengalami ketidakadilan dalam mendapatkan haknya. Kebanyakan orangtua memperlakukan anak-anaknya dengan didikan yang keras dan tidak dipenuhi dengan kasih sayang karena secara daya pikir bahwa kasih sayang orangtua tidak lepas dalam mendidik anak-anaknya. Karena untuk pola pikir kebanyakan orang tua, dengan memberikan segala keperluan yang diperlukan anaknya maka mereka sudah membahagiakan anak-anaknya, akan tetapi pola pikir sangat salah.

Oleh didasari kurangnya kepedulian tersebut banyak juga anak-anak yang dipaksa untuk bekerja dibawah umur, dengan pekerjaan seperti “mengamen”, berjualan, bahkan buruh kasar. Padahal sesuai salah satu salah satu Undang – undang bahwa yang dikatakan “Anak adalah setiap orang

---

<sup>31</sup> Ibid, hal.4.

berumur dibawah 18 tahun” jadi tidak diperbolehkan untuk bekerja secara kasar<sup>32</sup>. Melainkan berhak mendapatkan pendidikan Sembilan tahun, seperti yang diprogramkan pemerintah RI.

Selain itu keterpurukan mutu pendidikan dan moral yang sekarang ini di alami Indonesia juga berpengaruh bagi anak-anak karena dengan kesalahan pendidikan yang dialami oleh mereka, maka anak-anak juga akan tumbuh dengan pendidikan dan moral yang buruk. Oleh karena kurangnya kepedulian kita, maka organisasi anak dunia ini bergerak untuk bertujuan untuk membantu anak-anak yang ada di Indonesia, sesuai dengan perjanjian yang dibuat disemua Negara untuk anak-anak, dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak. Maka dalam hal itu Unicef memastikan agar setiap anak yang sebagai salah satu aspek pembangun bangsa memperoleh perlakuan khusus untuk dilindungi dan di perhatikan oleh suatu Negara .

Maka dari itu dibuat program PAUD-HI Pemerintah Indonesia kerjasama dengan Unicef meliputi program yang mempunyai dampak langsung pada kematian bayi dan pendidikan anak-anak serta program yang mempersiapkan juga meningkatkan peran serta masyarakat. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Unicef dalam program PAUD-HI karena Unicef merupakan organisasi internasional yang bertujuan membantu anak-

---

<sup>32</sup> Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003,tentang ketenagakerjaan Republik Indonesia.

anak menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan anak diseluruh dunia yaitu kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-hak mereka. Seperti pada salah satu misi dan tujuan Unicef untuk membantu anak-anak maka dari itu Pemerintah Indonesia dan Unicef membuat program PAUD-HI yang membantu anak-anak Indonesia dengan bantuan pendidikan, kesehatan, bantuan dana, dan lain-lain.

Dari kesepakatan Negara tentang kehidupan yang sehat, pendidikan yang berkualitas seharusnya pemerintah lebih sering mengadakan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat, memperhatikan tentang kualitas dari pendidikan, memberlakukan serta mempertegas UU tentang eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Secara internasional, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini semakin serius maka itu dibuatlah Komitmen Internasional<sup>33</sup> yaitu:

1. *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua=PUS) DI Jomtien-Thailand (1999) yang memperjuangkan kesejahteraan bagi anak di seluruh dunia, *Education for All*, pendidikan untuk semua (PUS) yang menyepakati perlunya pendidikan untuk semua orang sejak lahir sampai menjelang ajal (Suara Merdeka, *Cyber News*)

---

<sup>33</sup> Pelaksanaan Stimulan Pendidikan di Taman Padditungka, 2013, Watampoe, hal 5.

2. Deklarasi Dakar, Sinegal (2000) antara lain : menyatakan tekad untuk memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung
3. Komitmen New york USA (2002) menyepakati konsep Work Fit for children ( dunia yang sehat/aman bagi anak ). World Fit for Children dicanangkan dalam pertemuan pendidikan dunia di New York tahun 2002, yang telah menyepakati untuk menyepakati dunia aman dan kehidupan yang sehat bagi anak *World Fit for Children* telah mencanangkan kehidupan yang sehat, pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap aniaya, eksploitasi, dan kekerasan, serta memerangi HIV/ AIDS.

Program ini mencakup program pelayanan kesehatan terpadu (gizi, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta penanggulangan penyakit diare), penyediaan air dan penyehatan lingkungan, pembangunan desa, pendidikan, pelayanan area dan kampung serta pelayanan pendukung program. Anak-anak usia dini di Indonesia yang termasuk dalam kelompok usia 0 hingga 6 tahun berada dalam tahap awal pertumbuhan yang dikenal dengan istilah “*golden age*” atau masa keemasan. Tingkat daya serap otak anak-anak pada kisaran

usia ini berada pada tahapan luar biasa dan mengagumkan di mana perkembangan kapasitas otak mencapai 80%<sup>34</sup>.

Berdasarkan fakta ilmiah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud) meluncurkan program “Pendidikan Anak Usia Dini” atau disingkat PAUD melalui Pasal 28 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003<sup>35</sup>. Pada tahun 2006 Kemdikbud menjalin kerja sama dengan Unicef Indonesia untuk mengembangkan PAUD di daerah-daerah kurang mampu di Indonesia, yang kemudian istilahnya berkembang menjadi “Pengembangan Anak Usia Dini-Holistik dan Integratif” atau PAUD-HI, dengan konsep pendekatan secara holistik dan terintegrasi dengan unsur-unsur kehidupan masyarakat lainnya. Pengembangan anak usia dini tidak hanya bertolak ukur pada segi pendidikan, tetapi erat kaitannya dengan pergaulan dan komunikasi di lingkungan keluarga, unsur sosial dan budaya masyarakat, asupan gizi dari sang ibu sejak anak berada dalam kandungan dan selama masa menyusui, kebersihan lingkungan, hingga unsur religi/agama.

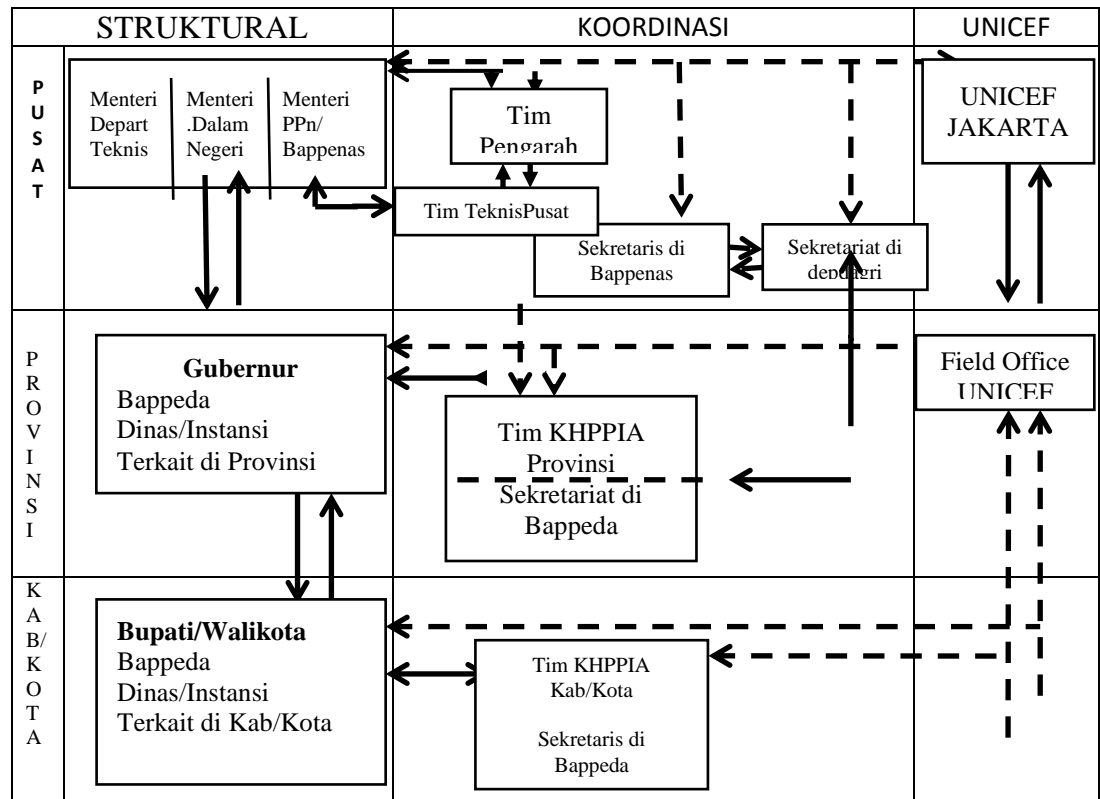
Tabel 3.1  
Organisasi Program Kerjasama

---

<sup>34</sup> Penyusunan Modul PAUD Taman SIWALIPARRI. <http://www.mdgspolman.org/penyusunan-modul-taman-siwaliparri/> diakses 19 April 2014.

<sup>35</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <http://www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>, diakses tgl 27 April 2014.





Keterangan :

: GarisFasilitasi, KonsultasidanLaporan  
 : GarisKoordinasi

Sumber : Pedoman Umum Kerjasama RI-Unicef Periode 2006-2010  
 Ditkumham.bappenas.go.id, diakses tanggal 10 Oktober 2014

Program PAUD-HI yang bekerjasama pemerintah RI-Unicef menjadi program yang melibatkan partisipasi aktif berbagai instansi pemerintah, mulai dari Dinas Pendidikan (Dindik) melalui gerakan PAUD, Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Posyandu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Bina Keluarga Balita (BKB), hingga Dinas Agama dan

Dinas Sosial. Semuanya bernaung di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Lokasi kabupaten/kota di mana program akan dilaksanakan ditentukan bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi (BAPPEDA Sulawesi Selatan) dan Unicef sesuai dengan kemampuan dukungan Unicef. Di Desa Lokasi dimana sedang terjadi bencana lainnya dan atau ledakan penyakit (*outbreak*) dan Unicef melalui unit penanggulangan bencana dan unit kesehatannya menyanggupi untuk membantu. Lokasi tambahan yang disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat (instansi terkait dan Bappenas), Donor dan Unicef.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tingkat pendidikan ibu yang lebih tinggi mempromosikan perilaku sehat dan perilaku pencarian pengobatan (*health-seeking*) sehingga terkait dengan kemungkinan penurunan kematian anak sebelum ulang tahun kelima mereka, dan dengan penurunan resiko kematian ibu. Anak-anak muda yang siap untuk bersekolah akan lebih siap untuk belajar, lebih mungkin untuk tetap bersekolah dan lebih mungkin untuk berhasil, dengan kemampuan penghasilan yang lebih tinggi. Pengetahuan orang muda tentang kesehatan reproduksi dapat membantu mengurangi resiko HIV dan IMS (infeksi menular seksual).

Kesiapan bersekolah merupakan strategi yang telah terbukti untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial sebuah masyarakat. Berbagai studi menunjukkan manfaat dan pengembalian investasi dari kesiapan bersekolah, terkait dengan penurunan biaya pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan manusia, dan manfaat bagi masyarakat. Program-program pendidikan dan perkembangan anak usia dini (PAUD) yang efektif dapat menurunkan biaya pendidikan melalui peningkatan efisiensi internal pendidikan dasar: sedikit anak mengulang kelas. Secara keseluruhan, manfaat program PAUD bagi masyarakat lebih besar daripada biaya-biaya tersebut sebesar lima sampai tujuh kali.

Kesiapan bersekolah harus dimasukkan dalam perkembangan anak secara holistik, yang meliputi keterampilan dan pengetahuan verbal dan intelektual, kemampuan sosial, serta status kesehatan dan gizi. Studi menunjukkan bahwa kinerja pendidikan yang buruk, penurunan lama pendidikan dan penurunan pendapatan ketika dewasa semuanya dapat dikaitkan dengan anak-anak muda yang bertubuh pendek (stunting). Oleh karena itu, anak-anak memperoleh manfaat terbesar jika program-program PAUD bersifat holistik, yang mengintegrasikan intervensi psikososial dan kesiapan bersekolah dengan intervensi kesehatan dan gizi.

Perkembangan holistik sangat penting bagi kesiapan anak untuk bersekolah dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam lingkungan belajar yang berbeda. Hubungan yang kuat antara perkembangan holistik anak dan kesiapan bersekolah menekankan pentingnya program-program PAUD terpadu multi-sektoral, yang menyatukan kesehatan, gizi, pendidikan dan perlindungan, yang menjamin semua anak tentang awal yang kuat untuk hidup. Bagi Unicef, setiap anak harus

diperhitungkan. Kemajuan menuju MDG hanya dapat dicapai jika anak-anak mendapatkan perhatian.

Untuk mewujudkan tujuan MDG, Unicef mendukung pemerintah dan lembaga mitra dalam mengidentifikasi anak-anak yang tidak dapat menikmati pembangunan, sehingga hak-hak anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan dan kemajuan. Sehingga Indonesia telah mengalami kemajuan luar biasa dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dalam hal pendidikan dasar universal dan kesetaraan gender. Indonesia telah mencapai kesetaraan gender untuk literasi perempuan, pendidikan dasar dan menengah pertama, dan hampir telah mencapai target kesetaraan gender untuk pendidikan menengah atas. Untuk pendidikan tinggi, angka kehadiran anak perempuan terhadap angka kehadiran anak laki-laki sebesar 96 persen pada tahun 2010<sup>36</sup>.

Anak-anak yang bekerja memiliki kemungkinan 30 persen lebih rendah untuk bersekolah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak bekerja. Di Indonesia, pekerja anak pada umumnya merupakan fenomena perdesaan dan pertanian. Akan tetapi, bekerja tidak harus menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan formal<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Ringkasan Kajian Pendidikan.pdf hal 2. [www.unicef.org/indonesia/id/A3 - B Ringkasan Kajian Pendidikan.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/A3_-_B_Ringkasan_Kajian_Pendidikan.pdf), diakses 14 Agustus 2014

<sup>37</sup> Ibid hal.5.

Program kerjasama Unicef menempatkan prioritas utama pada 14 provinsi melalui Pemilihan Provinsi lokasi program kerjasama 2006-2010 didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Provinsi Sumatera Utara<sup>38</sup>. Dari semua provinsi itu mencakup 85% dari seluruh populasi anak di Indonesia atau kira-kira 18.200.000 anak di bawah usia lima tahun.<sup>39</sup>

## **B. Perkembangan Pendidikan Dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan**

Unicef yang dikenal sebagai organisasi dunia yang secara khusus menangani soal kesejahteraan dan pendidikan anak, mengembangkan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik dan Integratif terutama di Sulawesi Selatan. Melalui program bantuan Unicef tersebut, pengembangan pendidikan anak usia di daerah ini berfokus pada pendidikan dengan mempercayakan metodologi pembelajaran yang berbeda, kesehatan dengan pengembangan dan pertumbuhan anak yang sehat dan baik khususnya yang

---

<sup>38</sup> Pedoman Umum Kerjasama RI-Unicef Periode 2006-2010, [www.ditkumham.bappenas.go.id](http://www.ditkumham.bappenas.go.id), diakses tanggal 10 Oktober 2014.

<sup>39</sup> T. May Rudy, 2009, Adminitrasi & Organisasi Internsional, Bandung:Refiak Aditama, hal 143.

diterapkan untuk anak-anak usia dini. Anak merupakan harapan orang tua, bangsa dan dunia.

Sistem pendidikan anak usia dini akan menempuh metode pembelajaran holistik dan terintegrasi. Dalam sistem tersebut, akan ada perpaduan pendidikan umum dengan pendidikan agama, pendidikan kesehatan, dan gizi. Memasuki abad dua puluh satu bangsa Indonesia akan mengalami tantangan dan masalah yang sangat kompleks. Di satu sisi, secara internal kita masih belum mampu keluar dari kritis multidimensional yang berlangsung sejak tahun 1977. Sementara itu di sisi lain secara eksternal bila dihadapkan pada realitas persaingan antarbangsa semakin meningkat dan kompetitif.

Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif adalah layanan melalui Satuan PAUD Sejenis atau disingkat SPS seperti POS PAUD yakni stimulasi Pendidikan yang terintegrasi dengan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu (kelompok usia 0 – 6 tahun yang tidak terlayani program PAUD lainnya). Selanjutnya terdapat layanan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK) maupun Taman Penitipan Anak (TPA)<sup>40</sup>. Dalam kaitannya dengan pendidikan dimulai dari usia dini, pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat menentukan.

---

<sup>40</sup> Kerangka Besar Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) terpadu Dengan Pendekatan Holistik dan Integratif Provinsi Jawa Tengah Periode : 2013-2018.

Pada usia ini berbagai pertumbuhan dan perkembangan muali dan sedang berlangsung, seperti perkembangan fisiologik, bahasa, motorik, kognitif. Perkembangan ini akan menjadi dasar bagi perkembangan anak selanjutnya. Oleh karena menjadi dasar, maka perkembangan pada masa awal ini akan menjadi penentu bagi perkembangan selanjutnya. Sebagaimana dikemukakan Havighurst (1959), yang menyatakan bahwa perkembangan pada satu tahap perkembangan akan menentukan bagi perkembangan selanjutnya. Keberhasilan dalam menjalankan tugas perkembangan pada suatu masa akan menentukan keberhasilan pada masa perkembangan berikutnya.<sup>41</sup>

Arah kebijakan PAUD di Indonesia dapat dilihat dari<sup>42</sup> :

Misi : adalah terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan fisik maupaun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Visi : adalah (1) mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggara pendidikan dini; (2) mengupayakan peningkatan dan kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan pendidikan dini; (3) mempersiapkan anak sedini mungkin agar kelak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.

---

<sup>41</sup> Anita Yus, 2011, Model Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta;Kencana Media Group, hal.xi.

<sup>42</sup> Yuliani Nurani Sujiono, 2009, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta; Indeks Permata Puri Media, hal.49.

Salah satu bentuk program PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuh dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai usia enam tahun (dengan prioritas anak usia empat tahun ke bawah). Pendekatan yang dilakukan PAUD yaitu dengan pendekatan, pendekatan yang dilakukan adalah

1. Holistik; gizi, kesehatan, dan kesehatan
2. Terintegrasi; program PAUD , merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keseluruhan stimulasi dan/atau layanan anak usia dini yang ada dimasyarakat.

Maka dari itu Unicef membuat program pendidikan anak usia dini agar anak-anak yang ada di masyarakat terutama di kalangan yang kurang mampu mereka tetap mendapatkan pendidikan di usia dini. Dengan terintegrasinya gizi, kesehatan dan pendidikan mereka bisa dapat pelayanan yang lebih praktis dalam satu tempat.

Karena setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, UU Perlindungan Anak (No 23 tahun 2002) pasal 4 yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya (pasal 9 ayat



1) dan selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak emiliki eunggulan juga mendapatkan pendidkan khusus (Pasal 9 Ayat 2) Departemen Sosial RI, 2002.<sup>43</sup> Berkaitan dengan hal tersebut dan mendukung peningkatan akses serta mutu layanan PAUD, maka Dinas Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Unicef. Di Provinsi Sulawesi Selatan ada di dua Kabupaten yaitu di Kabupaten Bone dan Kabupaten Takalar yang tersebar di seluruh daerah tersebut perkotaan dan peredesaan.

#### **A. Kabupaten Bone**

Pemerintah Kabupaten Bone merupakan awal kerjasama Unicef dalam program PAUD-HI di Sulawesi Selatan memulai kerjasama di tahun 2006. Paditungka berasal dari Bahasa Bugis, (dipelihara/dirawat). Taman Paditungka (Pendidikan Tumbuh Kembang Anak), merupakan salah satu lembaga layanan pendidikan (psikososial), kesehatan dan gizi kepada anak usia dini secara terpadu yang termasuk dalam satuan padu sejenis (SPS). Paditungka berasal dari Bahasa Bugis, (dipelihara/dirawat). Taman Paditungka (Pendidikan Tumbuh Kembang Anak), merupakan salah satu lembaga layana pendidikan (psikososial), kesehatan dan gizi kepada anak usia dini secara terpadu yang termasuk dalam satuan padu sejenis (SPS).

---

<sup>43</sup> Mukhtar Latif, Zukhairina, Rita Zubaidah, Muhammad Affandi, 2013, Orinetasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta;Kencana Prenada Media Group, hal.25.

Tabel 3.2 PAUD-HI Taman Padditungka Kabupaten Bone

No	Kecamatan Boccoe	Kecamatan Ponre
1	TP. UNYI	TP. PATTIMPA I
2	TP. PAKKASALO	TP. PATTIMPA II
3	TP. UJUNG	TP. BOLLI I
4	TP. SOLO	TP. BOLLI II
5	TP. MELLE	TP. MAPPASENGKA I
6	TP. TAWAROE	TP. MAPPASENGKA II
7	TP. TOCINA	TP. MATTAMPAE
8	TP. LALLATAANG	TP. POLEONRO
9	TP. PRAJAMAJU	TP. TELLU BOCCOE
10	TP. MARIO	TP. SALAMPE
11	TP. LACCORI	TP. SALEBBA
12	TP. KAMPOTI	TP. TURU ADAE
13	TP. TEMPE	
14	TP. PADACENGGA	
15	TP. ATANG PADACENGGA	
16	TP. CABBENG	
17	TP. MATAJANG	
18	TP. SANRANGENG	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, data diolah peneliti

Lokasi awal PAUD berada di Bone yaitu Taman Paditungka berada di 2 Kecamatan yaitu Dua Boccoe dan Ponre dengan jumlah 30 TP di tahun 2006. Pemerintah kabupaten Bone memperluas program ini keseluruhan kecamatan hingga tahun 2008. Daerah ini dipilih dengan alasan adanya permasalahan dasar yang harus diatasi yaitu masih kurangnya Taman Kanak- Kanak (TK) dan minimnya fasilitas kesehatan. Tahun 2010, ada penambahan 24 TP yang direplikasi di 15 kecamatan. Sampai tahun 2012,

jumlah Taman Paditunga di kabupaten Bone berjumlah 60 yang tersebar di 27 kecamatan<sup>44</sup>.

Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No. 20 Tahun 2013)<sup>45</sup>. Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bone dapat dilaksanakan pada 3 jalur :

1. Jalur pendidikan formal : Taman Kanak – Kanak dan Raodathul Atfal
2. Jalur pendidikan Nonformal : Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) .Satuan PAUD Sejenis / Taman Paditunga
3. Jalur pendidikan Informal : PAUD dalam keluarga dan lingkungan

Penanganan Anak Harus Holistik dan Integratif di Taman Paditunga.

Dengan tumbuh kembang anak membutuhkan asupan gizi, perawatan, kesehatan, dan pemberian stimulasi (rangsangan pendidikan ) secara berkelanjutan dan terpadu. Bila selama ini kita beranggapan hanya gizi dan

---

<sup>44</sup> Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Lampiran 1 hal 88

<sup>45</sup> Pelaksanaan Stimulan Pendidikan di Taman Paditunga, Disampaikan pada publikasi dan sosialisasi paud, 2013, Watampone.

kesehatan anaklah yang mempengaruhi kecerdasan anak, ternyata persepsi ini keliru. Gizi, kesehatan dan pendidikan yang selanjutnya kita namakan “pilar” pengembangan anak usia dini, sama pentingnya dan saling mendukung, bahkan menurut hasil riset mutakhir kontribusi pemberian rangsangan pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan pemenuhan gizi. Aspek pengembangan yang bisa dioptimalkan di Taman Paditunga yaitu Moral dan nilai agama, Sosial emosional, Kemandirian dan kedisiplinan, Gerak kasar, Gerak halus, Kognitif dan bahasa seni .

Pusat Paditunga di tingkat desa yang dikerjakan dan dikelola oleh anggota masyarakat telah meningkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini. Saat ini mulai, tingkat partisipasi untuk PAUD adalah 12,05%. Hingga tahun 2008 tingkat partisipasi meningkat menjadi 26,23%. Partisipasi masyarakat juga terlihat dari kesediaan mereka menyumbangkan lahan, bahan bangunan, dan tenaga untuk pusat-pusat Paditunga.

## **B. Kabupaten Takalar**

Pemerintah Kabupaten Takalar memulai kerjasama dengan Unicef di tahun 2012, melalui lokakarya lahirlah kesepakatan nama PAUD HI di Kabupaten Takalar yaitu “Assamaturu”. Assamaturu secara filosofi berarti bersama-sama, berpegangan tangan dalam melakukan kebaikan “Assamaturu” merupakan akronim dari Asuhan Stimulasi Anak Mandiri Tumbuh Religius. Taman Assamaturu merupakan merupakan tempat membina anak-anak usia 0-

6 tahun serta tempat para orang tua diberikan pengetahuan pola asuh anak.

Sistem Pelayanan anak masih bersifat parsial (belum terintegrasi)<sup>46</sup>.

Lokasi awal PAUD-HI berada di Kabupaten Takalar yaitu Taman Assamaturu tercatat sebanyak 4 TA. Daerah ini dipilih dengan alasan adanya permasalahan dasar yang harus diatasi yaitu masih kurangnya Taman Kanak- Kanak (TK) dan minimnya fasilitas kesehatan. Dengan terinspirasi study pembelajaran di Kabupaten Bone.

Tabel 3.3  
PAUD-HI Taman Assamaturu Kabupaten Takalar

No	KABUPATEN TAKALAR	
1	KECAMATAN POLSEL	TA.HIMAWAN
2	KECAMATAN GALUT	TA. PERMATA BUNDA
3	KECAMATAN GALUT	TA. NURUL SIDRA
4	KECAMATAN SANROBONE	TA. MUTIARA

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, data diolah peneliti

Adanya Taman Assamaturu dengan alasan adanya permasalahan dasar yang harus diatasi yaitu masih kurangnya Taman Kanak- Kanak (TK) dan Sasaran program yang sangat besar, Layanan di posyandu yang tidak variatif sehingga terkesan monoton, Masyarakat / orang tua masih menganggap belajar itu bila membaca, menulis dan berhitung saja.

---

<sup>46</sup> Rapat Koordinasi & Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tmana Assamaturu, Tim Kerja Taman Assamaturu, 2014, Takalar.

Layanan yang dilakukan Taman Assamautur yaitu :

1. Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Pelayanan Posyandu

Dari dua kecamatan tersebut Unicef melakukan kerjasama dalam pengembangan anak usia dini agar dimana anak didik berhak menerima pendidikan untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya, yang saling melengkapi yaitu pendidikan, kesehatan dan perlindungan anak. Unicef juga telah memberi bantuan yaitu berbagai perlengkapan belajar dan bermain di tiap-tiap PAUD Kabupaten Bone dan Kabupaten Takalar agar anak didik selain belajar mereka juga bisa bermain, selain itu Unicef juga memberikan seminar, lokakarya, dan pelatihan kader berupa arahan untuk melaksanakan PAUD bagi kader-kader yang telah diberikan supaya mereka tidak hanya anak yang bisa belajar orang tua juga bisa belajar mengenai kesehatan dan perlindungan anak.

Tabel 3.3

Peran Pengasuh Dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Anak

TUGAS PERKEMBANGAN	TEMA	PERANAN PENTING
<b>0 – 2 TH MASA BAYI</b> 1. KASIH SAYANG; CINTA 2. PENGINDERAAN 3. KEMATANGAN FUNGSI MOTORIK	1. MASA KRITIS 2. PERANAN STIMULASI	PERAN ORANG TUA
<b>2 – 4 TH MASA ANAK-ANAK</b> 1. PENGENDALIAN DIRI 2. PERKEMBANGAN BAHASA 3. KHAYAL & BERMAIN 4. MENJELAJAH	1. PERAN BAHASA DALAM PROSES SOSIALISASI 2. MACAM-MACAM TEKNIK DISIPLIN	1. TEMPAT PENITIPAN ANAK 2. TAMAN POSYANDU / PLAY GROUP
<b>5 – 6 TH MASA PRA-SEKOLAH</b> 1. IDENTIFIKASI PERAN JENIS KELAMIN 2. PERKEMBANGAN MORAL 3. BERPIKIR KONGKRIT 4. BERMAIN KELOMPOK	1. PERKEMBANGAN 'HARGA DIRI'/PENGAKUAN 2. KUALITAS BERPIKIR ANAK	1. DAMPAK TV PENDAMPINGAN 2. DISIPLIN

Sumber : Publikasi dan sosialisasi paud-Hi, Pelaksana Posyandu Di Taman Padditungka, Dinas kesehatan di Bone

Gambar 3.1

PAUD HOLISTIK



Sumber : Kebijakan Program PAUD Tahun 2013, Direktorat Pembinaan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud.

**C. Bantuan *United Nations International Children's Emergency Fund* terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan**

Unicef dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan, perlu kiranya untuk melihat bagaimana alur bantuan yang diberikan oleh para pendonor kepada Unicef untuk kemudian diimplementasikan melalui program-program Unicef di Indonesia. Semua pendanaan Unicef berasal dari sumbangan sukarela pemerintah, badan-badan antar-pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perorangan. Sebagian besar sumbangan adalah untuk sumber umum Unicef. Pendapatan lain dapat diperuntukkan proyek-proyek tabahan yang disetujui oleh dewan atau untuk bantuan darurat dan rahbilitasi.

Untuk meningkatkan identifikasi biaya, Unicef terus meningkatkan prosedur-prosedurnya untuk mempersiapkan proyek-proyek yang dibiayai dengan dan tambahan dan untuk mengadakan pembicaraan dengan donor-donor dan pemerintah-pemerintah yang diberi bantuan. Direktur eksekutif memberikan otorisasi pengeluaran-pengeluaran untuk memenuhi komitmen-komitmen yang telah disetujui oleh Dewan untuk bantuan program dan anggaran administrasi. Untuk program kerjasama dengan suatu pemerintah,



pengeluaran yang telah disetujui tercermin dalam persetujuan-persetujuan berkala antara pemerintah dan Unicef.

Perorangan dan organisasi-organisasi di seluruh dunia juga merupakan sumber pendanaan yang sangat penting dan bagi Unicef mereka merupakan nilai yang jauh lebih besar dari jumlah subangan yang mereka berikan. Sebagai tangan PBB, untuk kepentingan rakyat, Unicef menikmati hubungan yang khas dengan organisasi-organisasi swasta dan masyarakat umum. Dukungan bahan-bahan dari masyarakat datang melalui penjualan kartu ucapan, sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal, bantuan-bantuan hibah dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga dan pengumpulan dan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah.

Usaha-usaha pengumpulan dana seperti itu sering disponsori oleh Komite-Komite Nasional. Unicef terus berusaha meningkatkan pendanaan baik dari para pendonor tradisional maupun sumber-sumber potensial lainnya. Walaupun sumber keuangan sederhana sifatnya, Unicef merupakan salah satu dari sumber kerjasama yang paling besar dalam pelayanan program-program yang bermanfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang.

Namun, pengumpulan dana langsung hanya merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas untuk mendorong saham yang lebih besar dari sumber nasional dan internasional yang akan diarahkan kepada pelayanan-pelayanan untuk anak-anak di negara ini. Unicef tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dana. Unicef berbeda, karena dalam melaksanakan mandatnya, ia tergantung pada

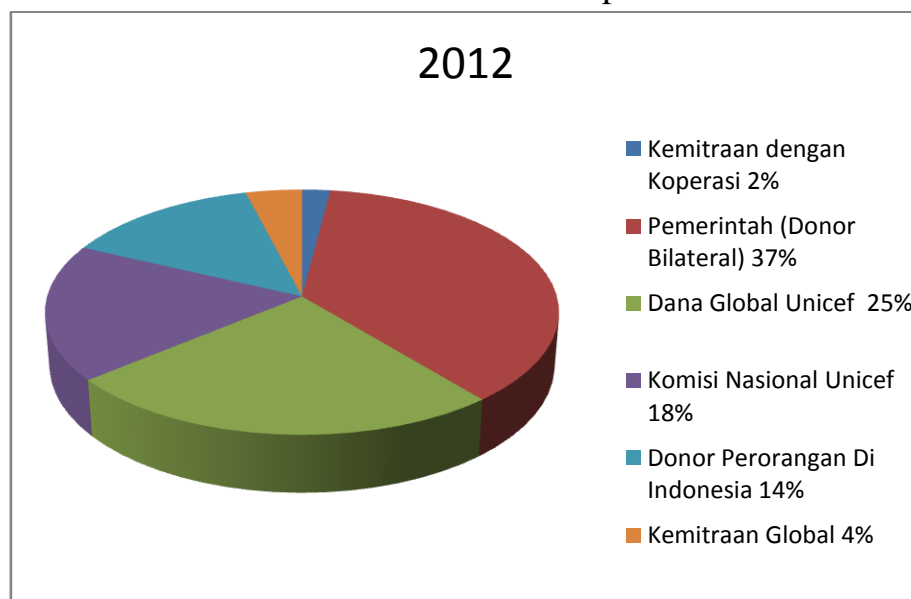
dana sukarela. Unicef bukan hanya mengusahakan dukungan pemerintah dan masyarakat untuk program kerjasama tetapi juga mencoba mendorong kesadaran masyarakat umum atas kebutuhan anak dan sarana untuk memenuhi melalui dukungan (*advocacy*) dengan pemerintah, pemimpin masyarakat, para pendidik dan para ahli lainnya dan kelompok kebudayaan, media dan masyarakat setempat.

Dalam hal ini Unicef sangat menghargai kemitraannya dengan Komite-komite Nasional untuk Unicef dan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di negara-negara berkembang. Untuk menggali sumber daya, menghasilkan kesepakatan, dan mendorong ide-ide baru untuk kepentingan anak-anak di Indonesia, Unicef menjalin kemitraan dengan beberapa pihak di daerah, kota, dan dunia termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor dunia usaha, perusahaan, dan individu. Kelompok lainnya adalah perusahaan swasta yang menyumbangkan dana ke Unicef atau melalui konsumen yang memberikan kontribusi secara sukarela. Kemitraan yang berlanjut dengan mitra seperti Australia (AusAid), Amerika (USAID), Selandia Baru, dan Norwegia telah membuat Unicef dapat menerapkan program penting di beberapa bidang, seperti kesehatan, gizi, pendidikan, HIV/AIDS, dan perlindungan anak.

Program juga didukung oleh lembaga lain seperti Dana Global untuk memerangi AIDS, *Tuberculosis* dan Malaria atau *Global Fund to fight AIDS, Bill and Melinda Gates Foundation* yang mengerjakan program sanitasi yang

diprakarsai oleh masyarakat, Bank Dunia yang bertujuan memperkuat komponen gizi dari program pengurangan kemiskinan, atau GAIN mendorong pengayaan kandungan yodium dalam garam secara universal di Indonesia. Unicef juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti *Save the Children* dan *Plan International* di bidang pendidikan, pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat<sup>47</sup>.

Gambar 3.2  
Bantuan Unicef Berdasarkan Laporan Tahunan 2012



Sumber : Unicef Indonesia Laporan 2012

Berdasarkan gambar 3.1 memperjelas bahwa sebagian besar fokus bantuan Unicef berupa bantuan dana global Unicef 25% dan komisi nasional Unicef 18%. Bantuan kemitraan dengan koperasi 2% dan pemerintah (donor

<sup>47</sup> Cerita dari Indonesia, Unicef, hal 24  
[www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF\\_Business\\_Case\(Ind\).pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Business_Case(Ind).pdf) diakses tanggal 14 Agustus 2014

bilateral) 37%, donor dari perorangan di Indonesia 14% dan kemitraan global 4%. Dari data gambar 3.1 membuktikan Pelaksanaan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Unicef sebagian besar didanai oleh kontribusi sukarela dari individu, perusahaan, dan donor bilateral.

Berdasarkan penyaluran bantuannya terbagi ke dalam dua bentuk bantuan kerjasama yakni bantuan kerjasama bilateral dan multilateral. Bantuan bilateral merupakan bantuan yang diberikan langsung kepada Unicef dari pemerintah atau bantuan bantuan lainnya, bantuan bilateral ini terbagi ke dalam dua bentuk yakni bantuan kerjasama teknis dan bantuan Hibah. Sedangkan, bantuan multilateral diberikan melalui organisasi internasional yang salah satunya adalah penyaluran bantuan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jenis bantuan yang diberikan Unicef ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Takalar yaitu berupa bantuan mainan untuk perlengkapan PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten tersebut. Setelah percontohan di Kabupaten Bone dan Takalar, Unicef juga memberikan bantuan Pendidikan dan Kesehatan PAUD-HI di Kabupaten lain seperti Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Barru. Adapun pilihan-pilihan program untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang dibantu oleh Unicef<sup>48</sup> :

---

<sup>48</sup> Pendidikan Anak Usia Dini suatu keharusan untuk menghindari Hilangnya Generasi yang berkualitas. I Made Sutama-Kepala UNICEF-Jateng. Disampaikan dalam semiloka: Pangarusutamaan Pengembangan dan Pengasuhan anak usia dini dalam kehidupan masyarakat. tgl. 31 Juli 2002 di Yogyakarta.hal16.

1. Memberikan Pelayanan pendidikan anak usia dini.
2. Memberikan pelatihan bagi para pengasuh anak dan pendidikan bagi orang tua.
3. Melibatkan masyarakat (toma-toga) melalui kegiatan yang berbasis pada masyarakat untuk pendidikan anak usia dini.
4. Memperkuat kemampuan dan sumberdaya tingkat nasional:
5. Meningkatkan kesadaran publik dan stimulasi demand.
6. Pengembangan Kerangka Kerja yg Legal mendukung kegiatan-kegiatan Pendidikan Anak usia dini.
7. Pengembangan Kebijakan-kebijakan nasional tentang pengasuhan anak dan keluarga.

**BAB IV**  
***PERAN UNITED NATION INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY***  
***FUND (UNICEF) TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN***  
***KESEHATAN MELALUI PAUD-HI DI***  
***SULAWESI SELATAN***

**A.    *Kepentingan dan Peran United Nations International Children's***  
***Emergency Fund terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan***  
***melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan***

UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) yang pada awal berjalannya berupa organisasi yang memberikan bantuan sukarela terhadap anak-anak terlantar akibat kekalahan perang di sejumlah wilayah dunia seperti di benua Eropa dan China. Dengan bantuan berupa obat-obatan, makanan, pakaian, diharapkan mampu memberikan ala kadarnya perlindungan bagi para anak-anak tersebut.

Namun seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, serta berakhirnya perang-perang dunia, maka UNICEF memperpanjang programnya di luar dari pada konteks perlindungan bagi anak-anak korban negara perang. Kini UNICEF menekankan pada aspek kesehatan, kesejahteraan, perbaikan gizi dan pendidikan untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama yang paling ditekankan di negara-negara berkembang. Menumbuhkan kepercayaan anak-anak terhadap negara, bangsa dan tanah air, membangun dunia bagi anak-anak agar hidup secara terhormat dan aman, menciptakan dunia yang layak bagi anak-anak tanpa terkecuali di seluruh

dunia. Inilah yang menjadi bagian dari program jangka panjang UNICEF dan merupakan tugas mulia yang patut kita beri apresiasi dalam tiap-tiap pelaksanaannya. Sehingga dalam pengabdianya di lapangan akan berjalan mulus apabila ada dukungan besar dari antar pemerintah dan kita tentunya sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Sebagai Organisasi Internasional, UNICEF yang merupakan organisasi non-pemerintah yang memiliki tujuan utama dalam menangani berbagai permasalahan anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Teuku May Rudi bahwa ,

Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antara negara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda<sup>49</sup>.

Berdasarkan konsep organisasi internasional tersebut, dapat dikatakan bahwa UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional dibawah naungan PBB.

Hal ini dikarenakan United Nations Children's Fund (UNICEF) atau Badan PBB untuk anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11

---

<sup>49</sup> Teuku May Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 19

Desember 1946. Bermarkas besar di Kota New York, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Untuk mencapai kepentingannya UNICEF yaitu mempertahankan hak-hak anak dimana setiap anak memperoleh hak-hak mereka dan memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan oleh peperangan, kemiskinan, cacat, korban bencana alam, dan segala bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap anak-anak.

UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Seperti yang dijelaskan pada bantuan luar negeri adalah proses transfer barang atau dana dari suatu negara ke negara lain. Menurut K.J Holsti bantuan luar negeri adalah sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima, dengan 4 tipe utama yaitu bantuan teknis, hibah, pinjaman bangunan, dan bantuan kemanusiaan<sup>50</sup>. Bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana.

Program-programnya yang menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak dan masuk ke berbagai negara-negara berkembang yang salah satunya adalah Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu

---

<sup>50</sup> Holsti, K.J, 1995, Politik Internasional : Kerangka Analisa (New Jersey:Prentice Hall), Hal.180.



negara tujuan UNICEF dalam melaksanakan berbagai program-programnya. UNICEF di Indonesia yaitu Sejak tahun 1950 sampai sekarang kerjasama masih berlangsung.

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan pengembangan anak-anak dengan perhatian khusus pada percepatan penurunan tingkat kesakitan dan kematian bayi, anak dan wanita. Bentuk kegiatan kerja sama tersebut yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), pengembangan program imunisasi BCG, DPT, polio, dan campak. Penanggulangan penyakit diare, dan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dan sebagainya.

Berdasarkan Dasar Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF adalah perjanjian kerjasama RI-UNICEF yang ditandatangani tanggal 17 November 1966. Untuk periode 2006-2010 telah disepakati Piagam Rencana Kerja Program Kerjasama (Country Program Action Plan) Pemerintah RI dengan UNICEF yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2006<sup>51</sup>. Kerjasama periode 2006-2010 sangat penting mengingat bersamaan dengan upaya Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi yang lebih kualitas, salah satunya yaitu dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, serta dengan merevitalisasi proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program-program kerja yang dilakukan UNICEF di Indonesia telah

---

<sup>51</sup> Lampiran hal .90

tersebar luas di 14 provinsi berdasarkan Rencana Kerja Program Kerjasama (Country Program Action Plan).

Sementara ini, pemerintah Indonesia sedang menangani perkembangan anak usia dini melalui sebuah pendekatan berbasis siklus kehidupan yang diharuskan memandang siklus perkembangan manusia pada masa reproduktif melalui kehamilan sampai kedewasaan penuh. Hal ini sesuai dengan kerjasama dengan UNICEF karena posisi UNICEF tentang pentingnya sebuah pendekatan terpadu pada program Pendekatan Anak Usia Dini dengan menggunakan pendekatan siklus kehidupan. Strategi nasional tentang Program PAUD Holistik Intergratif merekomendasikan 2 jenis layanan PAUD-HI<sup>52</sup> :

1. Layanan ‘Satu Atap’ yang terdiri dari Posyandu, pengasuhan anak, perawatan anak, pendidikan dini, serta perlindungan anak
2. Layanan-layanan terpadu

Fitur utama dari sebuah program PAUD-HI adalah dukungan dari sekumpulan layanan sosial dasar yang komprehensif dan langsung kepada anak-anak dan keluarga. Dan terdapat sebuah kesempatan bagi UNICEF untuk memberikan dukungan pelaksanaan program secara terpadu, melibatkan semua komponen program dan rencana koordinasi lintas sektoral

---

<sup>52</sup> Rencana Aksi Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF 2011-2015, Jakarta, 2013. Hal 44.

serta rencana dukungan operasional umum yang menjabarkan kontribusi, peranan dan tanggung jawab dalam mendukung pemerintah menerapkan PAUD-HI.

Salah satu program yang diadakan di provinsi Sulawesi Selatan yaitu penyelenggaraan pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif oleh pemerintah pusat dan daerah, masyarakat serta lembaga penyelenggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah pusat/daerah dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dan UNICEF untuk memberikan dukungan pelaksanaan program secara terpadu.

Lokasi kabupaten/kota di mana program PAUD-HI akan dilaksanakan ditentukan bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan UNICEF, dengan mempertimbangkan<sup>53</sup>:

1. Program dan komitmen yang masih berlangsung
2. Prioritas kebutuhan dan masalah spesifik sesuai dengan lingkup dan fokus program kerjasama

Pelaksanaan program kerjasama dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi/organisasi pengelola program. Untuk optimalisasi, perlu

---

<sup>53</sup> Pedoman Umum Kerjasama RI-UNICEF Periode 2006-2010, [www.ditkumham.bappenas.go.id](http://www.ditkumham.bappenas.go.id), diakses tanggal 10/10/2014

adanya koordinasi program/kegiatan yang dilakukan baik kegiatan yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait di pusat maupun di daerah.

a. Tingkat Daerah

Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas bantuan UNICEF dengan menetapkan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di Bappeda dan instansi terkait yang menerima langsung dana bantuan UNICEF. PJOK bertanggung jawab dalam teknis pelaksanaan program dan bersama PUMK bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dana bantuan UNICEF. Pelaksanaan teknis kegiatan program dilakukan oleh instansi-instansi terkait dan LSM di provinsi yang dikoordinasikan oleh Tim KHPPIA Provinsi dan difasilitasi oleh Tim Pusat. Dalam melakukan kegiatannya, instansi teknis tersebut menetapkan pengelola program yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dan administrasi.

b. Tingkat Pusat

Setiap instansi/organisasi terkait pengelola program bertanggung jawab atas bantuan UNICEF dengan menetapkan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK). PJOK bertanggung jawab dalam teknis pelaksanaan program dan bersama

PUMK bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dana bantuan UNICEF. Setiap instansi melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana dan anggaran yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam AWP . Seluruh instansi/organisasi pusat termasuk LSM dan UNICEF melakukan pertemuan berkala setiap tiga bulan sekali untuk konsolidasi dan konsultasi pelaksanaan program/kegiatan. Pertemuan tersebut dikoordinir oleh masing-masing Ketua Pokja.

Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas bantuan UNICEF dengan menunjuk Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di Bappeda. PJOK bertanggung jawab dalam teknis pelaksanaan program dan bersama PUMK bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dana bantuan UNICEF. Pelaksanaan teknis kegiatan program dilakukan oleh instansi-instansi terkait dan LSM di kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Tim KHPPIA Kabupaten/Kota dan difasilitasi oleh Tim KHPPIA Provinsi. Dalam melakukan kegiatannya, instansi teknis tersebut menetapkan pengelola program yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dan administrasi.

Pemerintah pusat melakukan Rakor Semester untuk mengkonsolidasikan Tim Teknis Pusat dan Tim KHPPIA Provinsi dalam rangka pelaksanaan program kerjasama baik di pusat maupun di daerah. Rakor Semester merupakan forum tingkat nasional, yang bertujuan untuk

menelaah perkembangan dan capaian pelaksanaan program pada semester berjalan di daerah lokasi kerjasama, mengkoordinasikan tindakan koreksi dan fasilitasi yang perlu dilakukan oleh Tim. Pelaporan pemerintah provinsi, yang dikoordinasikan oleh Tim KHPPIA, menyampaikan laporan hasil Rakor triwulanan, dan hasil tinjauan (semesteran, tahunan, tengah program, akhir program) kepada pemerintah cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Laporan meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Laporan ini oleh Sekretariat KHPPIA Ditjen Bina Bangda Depdagri akan dikompilasi dan dikirimkan ke Sekretariat Kerjasama RI-UNICEF Bappenas untuk menjadi masukan bagi Rapat Koordinasi (Rakor) Pokja, Rapat Koordinasi Manajemen (Rakorman), dan Tinjauan Tahunan di tingkat pusat. Khusus laporan hasil Rakor triwulanan mengikuti format matrik pemantauan kegiatan triwulanan dan laporan semesteran dan tahunan mengikuti format Matrik Tinjauan.

Pokja menyampaikan laporan Rakor triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Ketua Tim Pengarah (Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas). Laporan hasil Rakorman disusun oleh Sekretariat KHPPIA Ditjen Bina Bangda dan Tinjauan Tahunan, Tengah Program dan Akhir Program disusun oleh Sekretariat Kerjasama RI-UNICEF Bappenas. Melalui pengawasan UNICEF atau Auditor yang ditunjuk oleh UNICEF atau

Badan Pemeriksa yang ditunjuk oleh Pemerintah, akan melakukan audit program secara berkala sebagaimana diperlukan.

Melalui koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah, bentuk pemeriksaan dapat berupa peninjauan catatan dan dokumen yang berhubungan dengan dana dan bantuan UNICEF yang berkaitan dengan program. Dalam menjalankan programnya peranan yang dilakukan UNICEF yaitu :

a. Advokasi

Dalam melakukan program ini UNICEF meloby pemerintah dengan melakukan berbagai model penanggulangan yang telah diterapkan oleh UNICEF seperti memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dan memberikan dana hibah untuk program tersebut. Seperti pada salah satu program UNICEF dengan pelatihan-pelatihan para kader pendidikan anak usia dini yang berfokus pada pendidikan dengan mempercayakan metodologi pembelajaran yang berbeda, kesehatan dengan pengembangan dan pertumbuhan anak yang sehat dan baik khususnya yang diterapkan untuk anak-anak usia dini. Tujuannya agar seluruh kebutuhan esensial anak usia dini dapat terpenuhi, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya.

Dengan sasaran langsung anak usia dini sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun, sasaran secara tidak langsung yaitu orang tua,

kader, tenaga kesehatan dan gizi, pendidik, pengasuh, masyarakat, organisasi sosial masyarakat, para pengambil kebijakan, berbagai provider dan stakeholder lainnya yang relevan dengan terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini.<sup>54</sup>

*b. Capacity Building*

UNICEF juga melakukan peranan *capacity building* dengan program-program yang dimilikinya UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi setempat, sektor swasta, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak yang paling mendasar - dengan fokus utama pada mereka yang paling rentan. Program UNICEF di Indonesia dirancang berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. UNICEF mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu jutaan anak di Indonesia.

UNICEF dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan anak melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan, alur bantuan yang diberikan oleh para pendonor kepada UNICEF untuk kemudian diimplementasikan melalui program-program UNICEF di Indonesia. Semua pendanaan UNICEF berasal dari sumbangan sukarela pemerintah, badan-badan antar-pemerintah,

---

<sup>54</sup> *Deputi Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bidang SDM dan Kebudayaan*, 2009, Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Intergratif, Bappenas, hal 12.



lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perorangan. Sebagian besar sumbangan adalah untuk sumber umum UNICEF.

Bantuan yang diberikan UNICEF di Sulawesi Selatan secara umum yaitu bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana yang diberikan secara hibah. Berdasarkan indikator yang diberikan secara hibah, UNICEF memberikan bantuan dari :

- a. Hibah menurut sekama dan bentuknya UNICEF memberikan secara Hibah dalam rangka bantuan teknik (*technical assistance*) atau kerjasama teknik (*technical cooperation*).
- b. Hibah menurut peruntukan dan penyalurannya UNICEF memberikan secara Hibah untuk pemerintah (*government to government*).

Bantuan sepenuhnya yang diberikan UNICEF ke pemerintah Sulawesi Selatan dalam program PAUD-HI yaitu berupa Seminar, pelatihan-pelatihan dan bantuan berupa barang dan mainan untuk PAUD yang ada di kecamatan.

**B. Dampak Kerjasama Pemerintah dan UNICEF terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan**

Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap anak. Ini ditegaskan dalam UUD 1945. Pasal 31 ayat (1), UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dalam amandemen UUD 1945 (pasal 28B ayat 2) dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>55</sup>. Terkait dengan pendidikan anak usia dini, dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain disebutkan :

1. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
3. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal
4. Pendidikan anak usia dini pada pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat

---

<sup>55</sup> Laporan Pendidikan Untuk Semua Provinsi Sulawesi Selatan, 2008, hal 31.

5. Pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.

Dan perkembangan yang sudah dilakukan yaitu dengan PAUD (pendidikan anak usia dini) yaitu dengan bekerjasama dengan posyandu dan BKB menjadi satu tempat menjadi Holistik dan Intergratif. Beberapa kebijakan strategis yang ditempuh pemerintah Sulawesi Selatan dalam rangka pendidikan anak usia dini, antara lain<sup>56</sup>:

1. Memperluas akses bagi anak usia 0-6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar.
2. Melaksanakan Komunikasi, Informa, Edukasi (KIE) serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga miskin sadar akan pentingnya pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini.
3. Medorong peran serta masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan minat masyarakat (*demand side*) dalam menyelenggarakan program PAUD-HI.
4. Peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya penyelenggara dan satuan PAUD.

---

<sup>56</sup> Ibid. Hal 31.

5. Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD. Ini dilakukan melalui berbagai program peningkatan kompetensi, seperti pelatihan, pentaran, maupun bantuan untuk studi lanjut bagi tenaga pendidik.

Proses membentuk PAUD-HI dimulai kerjasama di tingkat pusat yang didasarkan pada Piagam perjanjian kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF yang disebut Rencana Kerja Program Kerjasama atau CPAP. Program kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF harus dilihat sebagai prioritas dalam upaya pembangunan SDM Dini untuk peningkatan Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) di daerah. Oleh karena itu, bantuan UNICEF merupakan pendukung atau stimulan bagi program-program pembangunan SDM Dini yang dilaksanakan oleh daerah.

Bantuan UNICEF sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam program kerjasama ini, dipandang sebagai bantuan untuk mendukung peningkatan peran Provinsi dalam rangka mengoptimalkan upaya pemerataan pembangunan SDM di daerah melalui fasilitasi program di kabupaten/kota, dan replikasi program di luar lokasi kerjasama dengan UNICEF. Pola penyelenggaraan Pembangunan SDM Dini diarahkan untuk mendorong prakarsa daerah agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (*resources*) daerah itu sendiri. Dalam prosesnya, dituntut adanya transparansi,

akuntabilitas publik, dukungan masyarakat, berkelanjutan, serta berorientasi pada visi dan misi yang jelas.

Dalam program kerjasama ini semua komponen/pelaku pembangunan di daerah, yaitu eksekutif, legislatif, dan masyarakat pada setiap keputusan dan pelaksanaan kebijakan program sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saat pemerintah kabupaten meningkatkan cakupan program, prosesnya dimulai dengan pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten yang berjumlah 15 orang mewakili Bappeda provinsi, Dinas Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, BKKBN, PKK dan LSM. Untuk merumuskan pengadopsian program PAUD, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK), SK ini diikuti dengan studi banding Bandung untuk melihat program serupa. Sebuah Pelatihan Training of Trainer (TOT) juga diadakan kolaborasi dengan KHPPIA untuk memperkuat implementasi inisiatif Kota/Kabupaten. Bantuan yang telah diberikan oleh UNICEF untuk mengembangkan sekumpulan indikator inti untuk mengukur sampai derajat mana kota-kota dan kabupaten layak bagi anak.

Sesuai dengan kebijakan PAUD di Indonesia, pemerintah Kabupaten Bone dan Kabupaten Takalar menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuh dan kesejahteraan sosial dari sejak lahir sampai umur 6 tahun. UNICEF di Sulawesi Selatan memulai programnya di tahun 2006 di Sulawesi Selatan, UNICEF memulai programnya di dua kabupaten yaitu

bone dan takalar. Program kerja yang dilakukan dengan seminar-seminar di dua kecamatan ini, seminar yang dilakukan salah satunya yaitu seminar kurikulum, materi paud, dan petunjuk jeins paud melalui kader-kader di kecamatan tersebut, yang diadakan oleh UNICEF.

Selanjutnya materi itu diberikan ke desa-desa lain agar program PAUD-HI tersebar melalui kader-kader yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah diadakan UNICEF . UNICEF dan pemerintah Kabupaten Bone melakukan percobaan di 2 kecamatan di Kabupaten Bone pada tahun 2006.

Setelah UNICEF dan pemerintah Kabupaten melihat percobaan PAUD-HI di Kabupaten Bone maka UNICEF dan pemerintah kabupaten lalu direplikasikan di 15 kecamatan. Karena UNICEF dan pemerintah kabupaten melihat bahwa PAUD-HI sangat penting bagi anak-anak yang tidak mampu maka UNICEF mengadvokasi desa-desa yang masih minimnya pendidikan dan kesehatan sehingga ditambah PAUD-HI. Dengan pengumpulan data oleh pemerintah desa tiap Kabupaten., beberapa lokasi dipilih berdasarkan kurangnya fasilitas PAUD-HI jumlah target anak usia dini di lokasi tersebut dan dengan komitmen masyarakat.

Proses ini melibatkan tim koordinasi dari UNICEF ke Kabupaten, para camat, petugas kesehatan dan petugas keluarga berencana. Selanjutnya

penilaian dilakukan oleh tim kabupaten yang berfokus pada para pemuka masyarakat, pemimpi agama, orang tua anak, petugas kesehatan dan petugas pendidikan. Setelah percobaan di Bone, UNICEF dan Bappeda Sulawesi Selatan melihat bahwa Kabupaten Takalar adanya permasalahan dasar yang harus diatasi yaitu masih kurangnya Taman Kanak- Kanak (TK) dan minimnya fasilitas kesehatan.

Dengan terinspirasi study pembelajaran di Kabupaten Bone dengan percontohan Kabupaten Bone. UNICEF melakukan programnya dengan seminar-seminar melalui perwakilan yang telah dipilih oleh pemerintah kabupaten Takalar. Setelah melakukan program tersebut pemerintah UNICEF melanjutkan ke desa-desa di Takalar yang telah dipilih oleh pemerintah.

Dampak yang terjadi di Kabupaten Bone dan Kabupaten Takalar dengan adanya PAUD-HI di kabupaten tempat kerjasama dengan UNICEF, anak-anak yang di kalangan yang kurang mampu mereka tetap mendapatkan pendidikan dengan usia dini dengan terintegrasinya gizi, kesehatan dan pendidikan. Di Kabupaten tersebut tidak semua kecamatan dipilih untuk melakukan program PAUD-HI yang dilakukan UNICEF. Karena setiap kabupaten, UNICEF telah mengadvokasi dan memilih desa-desa masih kurang dan minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa tersebut.

Konsultasi pada tingkat kabupaten diadakan dengan menyusulnya serangkaian konsultasi pada tingkat desa yang kemudian dibentuk pengelolah desa. Sebanyak 5 pelatih bagi para kader tiap kabupaten dan difasilitasi oleh UNICEF dan tim advokasi dari kabupaten. Hasil-hasil dari pelatihan ini antara lain teridentifikasinya kepemimpinan yang jelas dan kebutuhan dan terumuskannya rancangan anggaran. Pelatihan juga membantu para orang tua untuk menekankan kebutuhan mereka dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik akan PAUD-HI.

Kerja sama di antara berbagai lembaga pemerintah di tingkat kabupaten sudah optimal, sehingga mudah untuk melakukan pendekatan secara terpadu. Pemerintah daerah dan masyarakat sudah beberapa mengetahui pentingnya pemberian pelayanan PAUD-HI yang mengintegrasikan simulasi psikososial dan pembelajaran dini dengan intervensi kesehatan, kebersihan dan gizi. Sehingga di tingkat masyarakat memerlukan peningkatan pelayanan-pelayanan yang ada seperti Posyandu dan Bina Keluarga Berencana (BKB) /Pos PAUD.

PAUD-HI untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan orang tua dengan Dinas kabupaten memberikan pelatihan kepada para relawan (Dinas Kesehatan, keluarga berencana daerah, dan Dinas Pendidikan) harus bekerja sama untuk memastikan pelatihan terpadu dan penentuan sasaran yang tepat dari berbagai intervensi, dan untuk memastikan kelancaran transisi dari PAUD-HI ke sekolah dasar. Oleh karena itu, isu-isu terkait tentang



pembelajaran awal, bahasa pengajaran, persiapan guru “pra-sekolah” dan mereka yang mengajar kelas-kelas awal perlu ditangani secara tepat.

Pada kenyataannya, para relawan yang memberikan kedua pelayanan ini mungkin sama, tetapi mereka memainkan peran yang berbeda pada waktu yang bersamaan, sehingga memudahkan untuk mengintegrasikan komponen gizi dan psikososial di tingkat masyarakat. Prasekolah dan taman kanak-kanak yang mengajarkan membaca dan menulis secara umum sangat menonjol. Banyaknya program dan pemangku kepentingan PAUD-HI memerlukan koordinasi kebijakan yang kuat. Kabupaten juga mematuhi kebijakan dan prinsip nasional untuk PAUD yang Holistik dan Integratif. Advokasi perlu difokuskan pada hubungan penting antara hasil PAUD yaitu pendidikan, dan pada pentingnya penggabungan gizi dengan intervensi psikososial.

Sehingga dampak dari program kerjasama PAUD-HI anak-anak dari kelompok termiskin dapat memperoleh manfaat dari program-program PAUD holistik dan Integratif. Indonesia telah meningkatkan pengeluaran pendidikan secara mengesankan. Pengeluaran pendidikan pada tahun 2011 sebesar seperlima pengeluaran pemerintah dan 3 persen dari PDB. Akan tetapi, investasi 2009 dalam PAUD hanya sebesar 2,1 persen dari anggaran pendidikan, dibandingkan dengan standar internasional sebesar 4 sampai 5 persen<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup>Deputi Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bidang SDM dan Kebudayaan, 2009, Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif, Bappenas, hal.7.

Sebagai bagian dari program perlindungan sosial Indonesia, program PAUD-HI di kabupaten-kabupaten termiskin harus mendapatkan subsidi bagi setiap anak yang terdaftar. Anak-anak dalam masyarakat termiskin ini adalah anak-anak yang akan memperoleh manfaat terbesar dari pelayanan PAUD-HI, sehingga mengurangi dampak kemiskinan terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, Pemerintah pusat dan daerah harus mendukung PAUD-HI dalam masyarakat termiskin ini. Persyaratannya adalah bahwa subsidi tersebut hanya diberikan untuk program menyeluruh dengan intervensi gizi, kesiapan bersekolah dan intervensi psikososial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program-program kerjasama RI-UNICEF telah tersebar luas di beberapa provinsi, salah satu programnya di provinsi Sulawesi Selatan yaitu penyelenggaraan pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif oleh pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan kepentingannya UNICEF mempertahankan hak-hak anak dimana setiap anak memperoleh hak-hak mereka dan memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak. Peran UNICEF dalam melakukan program PAUD-HI di Sulawesi Selatan yaitu mengadvokasi dengan cara meloby pemerintah kabupaten dengan melakukan pendekatan lalu melakukan program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Masyarakat serta lembaga penyelenggara melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada program ini UNICEF dan pemerintah Sulawesi Selatan memperhatikan kepentingan anak terutama dalam pendidikan, kesehatan. Agar seluruh kebutuhan esensial anak dapat terpenuhi sehingga dapat tumbuh kembang secara optimal dengan tahap perkembangan usianya.
2. Dampak kerjasama pemerintah dan UNICEF terhadap pengembangan pendidikan dan kesehatan melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan yaitu dengan mengintegrasikan pelayanan PAUD-HI yaitu pendidikan,

kesehatan dan bina keluarga balita, dengan memilih lokasi yang masih kurang fasilitas, pendidikan dan kesehatan dengan cara UNICEF bekerjasama pemerintah dan masyarakat mengumpulkan data setiap kabupaten dan desa. Perkembangan dilakukan yaitu dengan bekerjasama dengan posyandu dan BKB menjadi satu tempat menjadi Holistik dan Intergratif. Sehingga yang terjadi di Kabupaten Bone dan Kabupaten Takalar dengan adanya PAUD-HI di kabupaten dengan kerjasama dengan UNICEF, anak-anak yang di kalangan yang kurang mampu mereka tetap mendapatkan pendidikan dengan usia dini dengan terintegrasinya gizi, kesehatan dan pendidikan.

## **B. Saran**

1. Dalam program program UNICEF di Sulawesi Selatan terutama program PAUD-HI sangat di perlukan upaya-upaya dan kerjasama yang sangat optimal terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta berbagai bantuan. Agar anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan di usia dini dan mereka di masa mudanya tidak dihabiskan dengan bekerja melainkan dengan belajar untuk masa depannya.
2. Kerjasama pemerintah dan UNICEF agar lebih memperluas program kerjasama yang telah dilakukan di kabupaten tersebut agar anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan di Usia Dini. Selain itu pemerintah Sulawesi Selatan juga menyediakan data statistik yang

lengkap untuk program yang diadakan oleh Pemerintah RI dan UNICEF.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Banyu Perwita, Anak Agung dan Yanyan Mochammad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Graha Ilmu:Bandung.
- Culla, Adi Suryadi, 2006, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Ikbar, Yanuar, 2007, *Ekonomi Politik Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama.
- J. Robert Dan Georg Sorensen, , 2009, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- K.J, Holsti, 1995, *Politik Internasional : Kerangka Analisa* (New Jersey:Prentice Hall).
- Latif, Mukhtar, Zukhairina, Rita Zubaidah, Muhammad Affffandi, 2013, *Orinetasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta;Kencana Prenada Media Group.
- Leviza, Jelly, 2009, *Tanggung Jawab bank Dunia dan IMF sebagai Subjek Hukum Internasional*, Jakarta: Sofimedia.
- Rudy, T. May, 2009, *Adminitrasi & Organisasi Internasional*, Bandung:Refiak Aditama.
- Suherman, Ade Maman, 2003, *Organisasi Internasional & Intergrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sujiono, Yuliani Nurani, 2009, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta; Indeks Permata Puri Media.
- Yus, Anita, 2011, *Model Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta;Kencana Media Group.

## **B. Dokumen**

Deputi Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bidang SDM dan Kebudayaan,  
2009.

Kerangka Besar Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) terpadu Dengan Pendekatan Holistik dan Integratif Provinsi Jawa Tengah Periode : 2013-2018.

Laporan Pendidikan Untuk Semua Provinsi Sulawesi Selatan, 2008

*Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif*,  
Bappenas,

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, 2003, *Penatausahaan dan Pengelolaan Hibah Luar Negeri*, Jakarta: Bappenas.

*Pelaksana Stimulan Pendidikan di Taman Paditunga*, 2013, Watampone.

Pendidikan Anak Usia Dini suatu keharusan untuk menghindari Hilangnya Generasi yang berkualitas. I Made Sutarna-Kepala UNICEF-Jateng. Disampaikan dalam semiloka: Pangarusutamaan Pengembangan dan Pengasuhan anak usia dini dalam kehidupan masyarakat. tgl. 31 Juli 2002 di Yogyakarta.

Publikasi dan sosialisasi paud-Hi Dinas kesehatan, Bone, Bone.

Rapat Koordinasi & Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Taman Assamutur, Tim Kerja Taman Assamuturu, 2014, Takalar.

Rencana Aksi Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Unicef  
2011-2015, Jakarta, 2013

UNICEF, Welcome to Unicef, an Orientation Handbook, Training  
Section,  
division Of Perssonel UNICEF (New York UNICEF 1990).

Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan  
Republik Indonesia

### C. Internet

Cerita dari Indonesia, Unicef,  
[www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF\\_Business\\_Case\(Ind\).pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Business_Case(Ind).pdf),  
diakses 14 Agustus 2014

Inspirasi Bakti Taman Paditungka-Program Terpadu Anak Usia Dini.  
[http://www.bakti.or.id/kegiatan/inspirasi-bakti-taman-  
paditungka-program-terpadubagianakusia-dini](http://www.bakti.or.id/kegiatan/inspirasi-bakti-taman-paditungka-program-terpadubagianakusia-dini), diakses 6 April  
2014

([http://www.unicef.org/media/media\\_359088.html](http://www.unicef.org/media/media_359088.html)).

Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri No 1  
tahun  
1979, [http://produk-  
hukum.kemenag.go.id/downloads/a8d848d723caa8e1fe0f2e1e97  
e68a4c.pdf](http://produk-hukum.kemenag.go.id/downloads/a8d848d723caa8e1fe0f2e1e97e68a4c.pdf), 30 April 2014

Ringkasan Kajian Pendidikan.pdf.  
[www.unicef.org/indonesia/id/A3 -  
B Ringkasan Kajian Pendidikan.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/A3_-_B_Ringkasan_Kajian_Pendidikan.pdf), diakses 14 Agustus 2014

Pedoman Umum Kerjasama RI-Unicef Periode 2006-2010,  
[www.ditkumham.bappenas.go.id](http://www.ditkumham.bappenas.go.id), 10 Oktober 2014



Penyusunan Modul PAUD Taman SIWALIPARRI.

<http://www.mdgspolman.org/penyusunan-modul-taman-siwaliparri/>, 19 April 2014

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013  
tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holisti-Integratif.

[http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/09/18/p/e/perpres\\_no.60-2013.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/09/18/p/e/perpres_no.60-2013.pdf), diakses 28 April 2014

Sejarah Singkat Unicef di Indonesia.

[http://www.unicef.org/indonesia/id/overview\\_3108.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html),  
diakses 18 April 2014

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem

Pendidikan Nasional. <http://www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>, diakses 27 April 2014

Lampiran 1

**PAUD-HI Taman Padditungka Kabupaten Bone**

NO	KECAMATAN	NAMA LEMBAGA/ PENGELOLA
1	AJANGALE	(Taman Paditungka) Lestari
2	AWANGPONE	Pusat PAUD Mahardika
		(Taman Paditungka) Siamasei
3	AMALI	(Taman Paditungka) Amali
4	BAREBBO	Pusat PAUD Wollangi
5	BONTOCANI	(Taman Paditungka) Walanae
6	BENGO	(Taman Paditungka) Menre Pulana
7	CINA	(Taman Paditungka) Masselesureng
		(Taman Paditungka) Kelling
8	CENRANA	Pusat PAUD Plamboyan
9	KAHU	(Taman Paditungka) Sulolipu
10	KAJUARA	Pusat PAUD Kuncup Mekar
		(Taman Paditungka) Sipakario rio
11	LAMURU	Pusat PAUD Harapan
		(Taman Paditungka) Al Mubarak
12	LAPPARIAJA	Pusat PAUD Mattola Palallo
		(Taman Paditungka) Allapporengge
13	LIBURENG	(Taman Paditungka) Padaelo
14	MARE	(Taman Paditungka) Pattunro Palallo
15	PALAKKA	Pusat PAUD Intan Astisah
16	PATIMPENG	Pusat PAUD Mattiro Deceng
17	SALOMEKKO	(Taman Paditungka) Permata
18	SIBULUE	Pusat PAUD Nurul Pertiwi
19	TELLU SIATTINGGE	Pusat PAUD Tenri Dio
20	TELLU LIMPOE	Pusat PAUD Teratai
21	TANETE RIATTANG	-

22	TR. BARAT	Pusat PAUD Polewali
23	TR. TIMUR	(Taman Paditungka) Al Fajri
24	TONRA	(Taman Paditungka) Mali Siparappe
25	ULAWENG	Pusat PAUD Agung Sakti

**SIARAN PERS**  
**PEMERINTAH INDONESIA DAN UNICEF**  
**TANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA LIMA TAHUN**

Jakarta, 27 Januari 2006

Pemerintah Indonesia hari ini menandatangani piagam kerja sama lima tahun dengan Badan PBB untuk Anak, UNICEF di Kantor Bappenas. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, H. Paskah Suzetta dan Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia, Dr. Gianfranco Rotigliano. Acara penandatanganan juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Moh. Ma'ruf, dan Gubernur dan Ketua DPRD dari 14 Provinsi lokasi kerja sama yang turut menandatangani piagam dukungan.

Kerja sama periode 2006-2010 yang ditandatangani kali ini meliputi tujuh program utama untuk meningkatkan martabat anak. Ketujuh program tersebut adalah Kesehatan dan Gizi, Air dan Sanitasi Lingkungan, Pendidikan, Penanggulangan HIV/AIDS, Perlindungan Anak, Komunikasi, dan Monitoring dan Evaluasi. UNICEF mengalokasikan bantuan sebesar 126,5 juta dolar AS (kurang lebih 1,2 triliun rupiah) bagi program-programnya di Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menekankan bahwa masa kanak-kanak mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Pada masa inilah investasi sumber daya manusia harus dilakukan sebaik-baiknya. Salah satu tantangan yang cukup besar adalah dari segi pembiayaan.

Paskah melanjutkan bahwa kemampuan negara dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di seluruh bidang, termasuk bagi pembangunan sumber daya manusia belum seperti yang diharapkan. Namun, hal ini tidak seharusnya menjadi alasan bagi melemahnya pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya lain yang perlu dilakukan adalah efisiensi penggunaan anggaran. Sebagai contoh, saat ini masih banyak dijumpai kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum efektif dari segi programatikanya.

Sementara itu, Dr. Rotigliano mengatakan bahwa kurun waktu lima tahun ke depan ini sangat penting bagi keberhasilan upaya Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*). "Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan selama satu dasawarsa terakhir, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan serta kemampuan baca-tulis. Namun, masih terdapat beberapa bidang yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu dalam penanganan kekurangan gizi pada anak, perbaikan kesehatan ibu, serta akses terhadap air yang aman."

UNICEF mencatat sejumlah kemajuan tidak merata yang diraih Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium:

- Angka kematian ibu yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dari rata-rata di Asia Timur (110 per 100.000);
- Angka partisipasi di tingkat sekolah dasar mencapai 94%. Namun, angka partisipasi di tingkat sekolah menengah pertama hanya 65%, dan diperkirakan dua juta anak usia sekolah tidak bersekolah;
- Terdapat tiga juta anak yang melakukan pekerjaan berbahaya;

- Banyak ditemukan pekerja seks perempuan di Indonesia berusia dibawah 18 tahun. Diperkirakan 100.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya; dan
- Studi baru-baru ini mengungkap bahwa perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak dan perempuan sering terjadi di Indonesia.

Dr. Rotigliano mengingatkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Pada tahun 2010 diperkirakan 110.000 orang akan menderita atau telah meninggal karena AIDS, dan 1,5 juta lainnya positif HIV. "Saya percaya Pemerintah Indonesia berada di jalur yang tepat dalam menangani isu-isu ini, dan UNICEF siap mendukung. Program kerja sama ini adalah bukti nyata komitmen kami terhadap anak-anak Indonesia," demikian Dr. Rotigliano.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja samanya dalam menyebarluaskan informasi ini.

JKRIakarta, 27 Januari 2006 Communication Officers: John Budd dan Kendartanti Subroto, Tel. 5705816, [jbudd@unicef.org](mailto:jbudd@unicef.org), [ksubroto@unicef.org](mailto:ksubroto@unicef.org) Direktorat KGM Bappenas: Yosi Diani Tresna dan Pungkas Bahjuri Tel. 31934379, [yosi@bappenas.go.id](mailto:yosi@bappenas.go.id), [pungkas@bappenas.go.id](mailto:pungkas@bappenas.go.id) Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: